

	b. Variabel Dalam Agenda	35
	c. Teknik Pengukuran Agenda	36
	D. Hasil Penelitian yang Relevan	38
	E. Kerangka Pemikiran	41
BAB III	METODE PENELITIAN	46
	A. Tipe Penelitian	46
	B. Lokasi Penelitian	47
	C. Sampel	47
	D. Teknik Pengumpulan Data	48
	E. Teknik Analisis Data	49
	F. Definisi Operasional.....	50
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
	B. Hasil Penelitian	62
	1. Agenda Media	62
	2. Agenda Publik	85
	3. Kesesuaian Antara Agenda Media dan Agenda Publik	94
	C. Pembahasan	97
BAB V	PENUTUP	120
	A. Kesimpulan	120
	B. Saran	121
	DAFTAR PUSTAKA	123
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berita kriminal adalah berita yang memuat informasi-informasi tentang kriminalitas, yang berarti informasi mengenai penyimpangan hukum dalam masyarakat. Pengertian tersebut didasarkan pada pendapat yang menerangkan bahwa kriminal adalah perbuatan jahat yang dapat dijatuhi hukuman menurut Undang-undang dan merupakan tindakan pidana bukan perbuatan perdata (Salim,1991). Sedangkan kriminalitas merupakan hal-hal yang bersifat kriminal; perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum pidana dan merupakan kejahatan. Pengertian tersebut dipengaruhi oleh sudut pandang hukum. Dari pandangan sosiologis, kriminal merupakan *"a violation of criminal law for which some governmental authority applies formal penalties"* (Schaefer,2001). Schaefer menjelaskan yang disebut kriminal adalah sebuah penyimpangan yang dilakukan seseorang terhadap aturan sosial yang dibuat oleh negara. Istilah kriminalitas erat kaitannya dengan penyimpangan atau deviansi. Dalam kajian sosiologis, orang yang melakukan tindakan kriminal berarti dirinya adalah berada dalam lingkungan yang salah.

Jenis kriminalitas sangat bervariasi. Banyak ahli sosiologi-kriminal masyarakat yang mencoba memilah jenis-jenis kriminal, diantaranya: *professional crime, organized crime, white collar* dan *technology-based*

crime dan *victimless crime* (Schaefer,2001). Chibnall (dalam Boyle,2005) mengidentifikasi ada 8 nilai berita kriminal. Ini merupakan investigasinya dalam jurnalisme kriminal di Inggris. Delapan nilai berita tersebut adalah: *immediacy (speed, currency)*, *dramatization (drama, action)*, *structured access (experts, authority)*, *novelty (angle, speculation, twist)*, *titillation (revealing the forbidden, voyeurism)*, *conventionalism (dominant ideology)*, *personalitaton (culture of personality, celebrity)*, *simplification (elimination of shades of grey)*.

Berita kriminal (Novilena, 2004) adalah uraian tentang peristiwa atau fakta, atau pendapat yang mengandung nilai berita tentang kejahatan yang disajikan di media massa. (Budhiarty, 2004) mendefinisikan berita kriminal sebagai cara dalam menyampaikan informasi hanya berkisar mengenai kejadian kriminal atau kejahatan, kecelakaan, kebakaran dan atau orang hilang, berita ini dapat dikemas dalam format berita (news) ataupun laporan mendalam (indepth report) yang mengupas suatu kasus lama atau baru yang belum, sudah terungkap, dan terkadang disertai tips-tips untuk mengantisipasi setiap modus kejahatan.

Berita dianggap menarik minat khalayak pembaca dengan kemasan aktual dan mendalam. Selain itu dengan berita yang bersifat komperehensif, interpretatif dan investigatif akan menambah pengetahuan dan wawasan khalayak secara mendalam (Budhiarty, 2004).

Berdasarkan teori kejahatan (kriminal) atau clasical teori kejahatan: Cesare Beccaria (1738-1794). Beccaria adalah seorang penganut

utilitarian, yang percaya bahwa orang akan berperilaku tertentu bertujuan untuk mendapatkan kepuasan dan menghindari hukuman.

Ciri-ciri classical theories adalah dalam setiap masyarakat, orang bebas dalam memilih solusi pidana atau hukum untuk memenuhi kebutuhan mereka atau menetapkan masalah mereka. Solusi pidana mungkin lebih menarik dari yang halal karena mereka biasanya membutuhkan sedikit pekerjaan untuk hasil yang lebih besar. Pilihan seseorang atas solusi kriminal dapat dikendalikan oleh ketakutannya pada hukuman. Hukuman lebih berat tertentu, dan cepat, semakin baik mampu itu adalah untuk mengendalikan perilaku kriminal.

Dalam sosiologi teori kejahatan (Quetelet (1796-1874) menemukan pengaruh kuat dari usia pada kejahatan. Selain, ia memiliki bukti bahwa musim, iklim, komposisi penduduk, dan kemiskinan juga terkait dengan kriminalitas.

Emile Durkheim (1858-1917)? Kejahatan adalah normal karena hampir tidak mungkin untuk membayangkan sebuah masyarakat dimana perilaku kriminal adalah sama sekali tidak ada. Bahkan kriminalitas bermanfaat karena membuka jalan menuju perubahan sosial (perubahan sosial).

Durkheim anomie, yaitu norma atau kebingungan peran. Masyarakat anomie dalam kekacauan, mengalami ketidakpastian moral dan menyertai hilangnya nilai-nilai tradisional. Orang yang menderita anomie dapat menjadi bingung dan rebellious. Konflik theories kejahatan

dengan tokoh utamanya Marx menjelaskan bahwa kejahatan adalah fungsi dari kompetisi untuk sumber daya terbatas dan daya kelas konflik antara borguise dan proletar menghasilkan kejahatan.

Hal ini sejalan dengan kontemporer teori kejahatan. Ada beberapa kekuatan yang menghasilkan kriminalitas. Biologis, kekuatan psikologis, ekonomi dan sosial politik dapat bergabung untuk menghasilkan kejahatan.

Garis pemisah antara awal masa dan akhir masa remaja terletak kira-kira sekitar usia tujuh belas tahun, usia saat dimana rata-rata setiap remaja memasuki sekolah menengah tingkat atas. Awal masa remaja berlangsung kira-kira dari tiga belas tahun sampai enam belas tahun atau tujuh belas tahun, dan masa akhir masa remaja bermula dari usia 16 atau 17 tahun sampai delapan belas tahun (Hurlock, 1980).

Perubahan perilaku mencakup aspek kognisi, afeksi dan aspek konasi. Menurut Winkel dalam (Suharto, 2006) kognisi adalah pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki khalayak. Afektif adalah sikap khalayak mengenai isi surat kabar dan tayangan berita di TV. Konasi adalah tindakan individu menurut cara tertentu. Menurut Hurlock dalam (Suharto, 2006) menjelaskan beberapa pola perilaku sosial pada masa anak-anak hingga remaja yaitu: (1) hasrat akan penerimaan sosial, (2) empati, kemampuan meletakkan diri dalam posisi orang lain dan menghayati pengalaman orang tersebut.

Berita kriminal telah menjadi kebijakan redaksional Harian Berita Kota Makassar. Kebijakan tersebut diambil karena telah menjadi suatu kekuatan yang sudah merasuk ke dalam kehidupan masyarakat di Sulawesi Selatan. Harian Berita Kota Makassar sebagai salah satu media massa lokal memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan media lokal lainnya di Makassar dalam penyampaian pesannya. Salah satu kelebihanannya adalah paling lengkap dalam hal menyajikan unsur pesan dan informasi kriminal bagi khalayak pembacanya dengan slogan "Suara Lokal Pembela Rakyat".

Oleh karena dilengkapi gambar dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan beritanya terasa lebih hidup dan dapat menjangkau ruang lingkup yang sangat luas. Manajemen redaksional Harian Berita Kota Makassar menilai semakin banyaknya media lokal di Makassar tentunya akan memunculkan persaingan dan situasi yang kompetitif antarmedia surat kabar guna merebut pangsa pasar dengan cara menyuguhkan berita-berita kriminal yang diperhitungkan dan disenangi oleh pembaca.

Untuk dapat menarik perhatian pembaca, konten dan angle berita yang ditawarkan dikemas semenarik mungkin. Berbagai konten berita yang disajikan dikemas dengan memperhatikan unsur informasi, pendidikan serta hiburan. Namun seiring berjalannya waktu dan ketatnya persaingan justru menggeser paradigma pengelola surat kabar untuk menyajikan program pemberitaan yang sehat. Program pemberitaan yang sering muncul di koran justru kurang memperhatikan unsur informasi,

pendidikan, sosial budaya bahkan etika dan norma masyarakat. Salah satunya unsur kekerasan dan informasi kriminal menjadi menu utama di berbagai jenis pemberitaan di Harian Berita Kota Makassar yang dikemas dalam bentuk straight news, feature, on the spot, investigasi dan lainnya.

Salah satunya pemberitaan yang mengandung unsur kekerasan dan dikemas dalam bentuk berita kriminal. Hampir keseluruhan berita kriminal yang diberitakan tidak segan menampilkan berita-berita yang menyeramkan langsung dari lokasi kejadian seperti korban kekerasan misalnya ceceran darah, bahkan menggambarkan kronologis kejadian secara lengkap. Saat ini hampir disemua halaman Harian Berita Kota Makassar terdapat berita kriminal dan hukum. Ada yang disajikan dalam bentuk berita mendalam (indepth news) seperti, "Kisah di Balik Jeruji Besi, "Berita Patroli, "Tim Buru Sergap, dan "Metro Realitas". Ada pula yang disajikan dalam bentuk berita langsung atau harian (daily news) seperti wawancara langsung dengan Pekerja Seks Komersial (PSK) atau sumber lainnya.

Unsur kekerasan yang terdapat dalam berita kriminal tidak dapat dibendung. Hal ini memicu munculnya faktor penentu perubahan bagi perilaku khalayaknya dalam aspek kognitif, afektif, dan konatif.

Surat kabar merupakan media massa yang cukup tua dibandingkan dengan jenis media massa lainnya. Surat kabar merupakan salah satu media komunikasi massa cetak. Sebagai media cetak dalam komunikasi massa, surat kabar memiliki sifat-sifat yang menguntungkan. Misalnya,

sifat permanen pesan yang telah dicetak, keleluasaan pembaca mengontrol kehadirannya (exposure) dan mudah disimpan serta diambil kembali.

Surat Kabar Harian Berita Kota Makassar adalah salah satu surat kabar lokal yang eksistensinya masih terjaga hingga saat ini. Berbeda halnya dengan surat kabar lokal lainnya, surat Kabar Harian Berita Kota Makassar lebih banyak menyajikan ragam berita yang menarik dan berbobot terutama informasi seperti berita-berita kriminal. Sebagai surat kabar harian maka konten berita yang ditampilkan lebih pada bersifat lokal dan senantiasa mendapat porsi tersendiri.

Pemilihan berita yang dianggap penting oleh surat kabar belum tentu dianggap penting oleh khalayak pembaca. Keefektifan isi berita dari suatu surat kabar apabila isi surat kabar tersebut dibutuhkan, dibaca dan dimengerti khalayak. Maka dari itu redaksi dari surat kabar harus menyaring berita, artikel atau tulisan yang akan diberitakannya dengan proses yang selektif, "gatekeepers.

Maka dari itu digunakan pendekatan agenda setting. Agenda setting adalah salah satu teori untuk melihat keefektifan dan kesesuaian antara agenda media dengan agenda khalayak. Dalam pengukuran agenda media setiap kejadian atau isu diberi bobot tertentu dengan panjang penyajian (ruang) dan cara penonjolan (ukuran judul, letak pada surat kabar, frekuensi pemberitaan, posisi dalam surat kabar).

Berita surat kabar telah menjadi salah satu kekuatan yang sudah merasuk ke dalam kehidupan masyarakat. Harian Berita Kota Makassar sebagai media massa lokal memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan media lain di dalam penyampaian beritanya. Salah satu kelebihan Harian Berita Kota Makassar adalah menerbitkan berita-berita kriminal di halaman utama dan halaman metro kriminal secara lengkap dalam hal menyajikan unsur-unsur pesan bagi pembacanya dengan dilengkapi foto-foto langsung dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan adegan serta suasana terasa lebih hidup dan dapat menjangkau ruang lingkup yang sangat luas.

Pengelola surat kabar menganggap semakin banyaknya media cetak akan memunculkan persaingan dan situasi yang kompetitif antarmedia satu dan yang lainnya untuk dapat merebut perhatian pembaca dengan cara menyuguhkan berita-berita yang diperhitungkan akan disenangi oleh pembaca. Untuk menarik perhatian publik, rubrik halaman yang ditawarkan dikemas semenarik mungkin. Berbagai rubrik yang disajikan didesain dengan memperhatikan unsur informasi, pendidikan, hiburan dan sosial. Namun, ketatnya persaingan justru menggeser paradigma pihak pengelola surat kabar untuk menyajikan perencanaan berita yang sehat. Perencanaan berita yang sering muncul di koran justru kurang memperhatikan unsur informasi, pendidikan, sosial budaya bahkan etika dan norma masyarakat. Salah satunya unsur kekerasan menjadi menu utama disebagian pemberitaan yang dikemas

dalam bentuk investigasi, wawancara khusus (eksklusif), program week end di Tempat Hiburan Malam (THM), on the spot, dan beberapa program berita lainnya.

Salah satunya pemberitaan yang mengandung unsur kekerasan dikemas dalam bentuk berita kriminal. Hampir keseluruhan berita kriminal tidak segan menampilkan foto-foto dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) seperti korban kekerasan misalnya ceceran darah, bahkan menggambarkan kronologis kejadian secara lengkap. Tapi seiring perjalanan waktu dan mencermati paradigma berpikir masyarakat khususnya pembaca setia Harian Berita Kota Makassar maka perencanaan pemberitaan perlahan mulai dilakukan revitalisasi.

Perencanaan berita yang sebelumnya hampir disemua halaman terdapat berita kriminal yang disajikan dalam bentuk berita mendalam (Kisah Dibalik Jeruji Besi), on the spot crime, berita buser, bersama patroli dan lainnya mulai dikurangi. Ada pula yang disajikan dalam bentuk berita feature secara bersambung. Berita model ini banyak diminati para pembaca sehingga redaksional menilai konten pemberitaan seperti ini tetap harus dipertahankan. Kebijakan redaksional yang tetap mempertahankan informasi kriminal selain telah menjadi posisi tawar dan salah satu nilai jual bagi Harian Berita Kota Makassar dimata pembaca juga sekaligus menjadi ciri khas dan menjadi pembeda dengan koran lokal lainnya di Makassar.

Redaksional Harian Berita Kota Makassar menyadari betul bahwa unsur kekerasan yang terdapat dalam berita kriminal sulit untuk dibendung. Hal ini memicu munculnya faktor penentu perubahan bagi perilaku khalayak dalam aspek kognitif, afektif, dan konatif. Alternatif berita kriminal di koran tentunya akan memberikan pengaruh bagi khalayak terutama jika berita kriminal yang diterbitkan dibaca oleh kalangan remaja.

“Tahap perkembangan anak-anak hingga remaja, pada fase inilah remaja mulai memiliki pola perilaku akan hasrat penerimaan sosial yang tinggi. Khalayak remaja mulai menyesuaikan pola perilaku sosial sesuai tuntutan sosial (Hurlock (Suharto, 2006))”

Remaja yang memiliki intentitas membaca berita kriminal mulai menyesuaikan hal-hal yang diterimanya dengan realitas sosial. Sehingga pengaruhnya akan cepat diterima terutama pada aspek kognitif yang meliputi pengetahuan akan kejahatan, aspek afektif meliputi perasaan atau emosi akan berita kekerasan bahkan aspek behavioral yang meliputi tindakan untuk meniru adegan kekerasan.

Penelitian ini akan membahas mengenai Kebijakan Redaksional Harian Berita Kota Makassar dalam Penyiaran Berita Kriminal di Kota Makassar. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya gencarnya berita kriminal menimbulkan kekhawatiran akan terbentuknya persepsi dan sikap atau karakter negatif yang kuat. Sehingga memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana berita kriminal dapat menimbulkan efek di kalangan pembaca, pembaca yang bagaimana yang terkena efek tersebut dan pertanyaan-pertanyaan sejenis lainnya yang hanya dapat dijawab melalui penelitian semacam ini.

Penelitian ini juga akan membahas mengenai efek informasi kekerasan pada berita kriminal terutama pada aspek kognitif dan aspek afektif. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, gencarnya berita kriminal menimbulkan kekhawatiran akan terbentuknya persepsi dan sikap atau karakter negatif yang kuat. Sehingga memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana siaran berita kriminal dapat menimbulkan efek di kalangan khalayak, khalayak yang bagaimana yang terkena efek tersebut dan pertanyaan-pertanyaan sejenis lainnya yang hanya dapat dijawab melalui penelitian semacam ini.

Harian Berita Kota Makassar sebagai Koran Metro pertama di Sulsel dan Sulbar berdasarkan hasil Survey AC Nielsen asal Amerika Serikat, Berita Kota Makassar dibaca 200.000 orang setiap hari, dengan area distribusi terbesar di Makassar, Gowa, Maros dan beredar di seluruh wilayah Sulsel, Sulbar dan Jakarta. Sedangkan dari hasil Survey ROY MORGAN Internasional 2012 dan 2013, Berita Kota Makassar masuk kategori Top News Paper Makassar dan Sulsel dengan 33 ribu pembaca setiap harinya.

Dari kedua lembaga survei tersebut, berita kriminal menempati peringkat kedua terbanyak pembacanya dengan 35 persen setelah halaman entertainment 40 persen. Disusul halaman politik 32 persen, sport 30 persen, metro 29 persen dan ekonomi dan bisnis 27 persen. Pada proses perencanaan agenda media dan agenda publik Harian Berita Kota Makassar mengambil berita kriminal sebagai porsi tertinggi daripada

berita-berita yang lainnya. Tingginya segmentasi pembaca pada berita kriminal menjadi dasar bagi redaksi dalam menentukan kebijakan redaksional setiap harinya.

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan uraian diatas, penelitian ini akan menitikberatkan permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana agenda media redaksi Surat Kabar Harian Berita Kota Makassar dalam menyajikan informasi kriminal?
2. Bagaimana agenda publik Surat Kabar Harian Berita Kota Makassar terhadap berita dan informasi kriminal?
3. Apakah ada kesesuaian antara agenda media dengan agenda publik tentang kebijakan redaksional terhadap informasi kriminal Surat Kabar Harian Berita Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Menganalisis agenda media Surat Kabar Harian Berita Kota Makassar dalam menyajikan informasi kriminal.
2. Mengidentifikasi agenda publik dan kebijakan redaksional Harian Berita Kota Makassar terhadap informasi kriminal.
3. Mengukur derajat kesesuaian antara agenda media dengan agenda publik dan kebijakan redaksional terhadap informasi kriminal Surat Kabar Harian Berita Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dapat diberikan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi pihak surat kabar yang bersangkutan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan guna mempertahankan dan meningkatkan kualitas isi berita seputar informasi kriminal.
2. Bagi penelitian selanjutnya dan perkembangan ilmu komunikasi, penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut mengenai media massa dalam konteks agenda setting.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Untuk membangun suatu penelitian, kerangka teori sangat diperlukan terutama sebagai landasan untuk menjawab masalah dalam sebuah penelitian. Sejalan dengan judul yang dibahas dalam penelitian ini, penulis melakukan pendekatan holistik dengan dukungan teori dan referensi tentang Kebijakan Redaksional Harian Berita Kota Makassar dalam Penyiaran Berita Kriminal di Kota Makassar.

Pada tahun 1895-an, media digunakan sebagai sebuah 'pertempuran headline' dua koran besar di kota New York yang dimiliki Joseph Pulitzer dengan koran (The World dan William Randolph Hearst dengan koran New York Journal: (www.pbs.org)). Saat itu, pemberitaan yang dipasang di headline adalah berita-berita yang sensasional, bombastis dan judulnya bisa menarik perhatian publik. Kedua media tersebut 'berperang' dan saling memasang berita yang dianggap 'panas' dan kontroversial. Headline atau berita utama di halaman utama sebuah koran, adalah tempat yang sangat strategis dalam menyampaikan sebuah berita dan itu terjadi disemua media cetak pada umumnya. Bahkan, headline sering menjadi indikator penilaian tentang agenda media dalam menyampaikan isu yang dianggap penting. Dalam berbagai riset tentang agenda media, headline menjadi salah satu unit analisis yang utama.

Kusumaningrat (2005:67) menjelaskan bahwa apa yang ditampilkan oleh jurnalisme kuning biasanya berisi sekitar masalah seks, kriminalitas (crime), serta “key-hole news”, yakni berita sekitar dapur dan kamar tidur orang lain dari hasil mengintip yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum yang diungkap secara sensasional. Makna sensasi, yang dalam bahasa Inggris *sense* menggambarkan bahwa apa yang disebut berita adalah apa yang isi dan cara mengungkapkannya didasarkan pada keinginan untuk menarik perhatian, membangkitkan perasaan dan emosi. Artinya, berita yang bagus adalah berita yang bisa menimbulkan perasaan ngeri, takjub, menggoda, merangsang serta menimbulkan luapan-luapan emosi yang mendalam. Begitupun dengan informasi-informasi bertajuk kriminal.

Suko Widodo (1996:45) dalam tulisan yang berjudul ‘Media Massa dan Informasi Kriminal’ mengemukakan tentang fungsi dan disfungsi pers. Saat ini, perkembangan permediaan sangat pesat, implikasinya juga terdapat dalam informasi yang disajikan oleh pers. Salah satunya adalah maraknya informasi kriminal di media massa. Berita-berita kriminal yang disajikan oleh pers, menurut Widodo, menjadi sebuah persoalan yang dualistis bagi pers. Di satu sisi, pers melakukan fungsi kontrol sebagai pengawas lingkungan. Di sisi lain, berita-berita kriminal dinilai memiliki banyak efek negatif yang ditemukan dalam diri audience setelah mengakses informasi kriminal (www.kompas.com). Indikasi lain, menginformasikan berita kriminal kepada masyarakat luas adalah tak lain

sebagai upaya mendongkrak perekonomian media itu sendiri. Dibumbui dengan cerita yang bombastis dan diandaikan seperti sebuah cerita, ada tokoh protagonis dan antagonis serta narasi yang runtut bagai alur drama yang mengalir. Media seperti itu pada dasarnya bersumber pada model jurnalisme kuning.

Selain berita kriminal, juga ada berita-berita mengenai seksualitas dan horor mencekam. Wacana dalam teks dikemas dalam konsep hiburan masyarakat, kontrol sosial dan legitimasi kekuasaan, baik dari institusi media sendiri maupun di luar itu (Fairclough;1995;86).

Jika dicermati, seluruh media cetak maupun elektronik berisi bahasa, baik bahasa verbal (kata-kata tertulis atau lisan) maupun bahasa non-verbal (gambar, foto, grafik, angka, dan tabel). Bahasa sebagai inti dari komunikasi. Melalui bahasa, orang menyampaikan arti yang dimaksud. Begitu pula dengan arus komunikasi massa melalui media cetak. Tulisan yang sudah tercetak dan tersebar itulah yang membuat masyarakat memaknai dan memberikan arti. Konstruksi berita oleh para pekerja media ini menandakan bahwa yang disebut sensasional dalam media sebenarnya adalah sebuah wacana konstruktif berita.

Koran Harian Berita Kota Makassar merupakan salah satu koran kriminal yang sasaran pembacanya adalah masyarakat Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Berita yang ditampilkan sebagai headline selalu berita kriminal meskipun sebenarnya koran Harian Berita Kota Makassar tidak hanya memposisikan diri sebagai koran kriminal. Jenis kejahatan yang

ditampilkan banyak didominasi oleh kejahatan konvensional seperti perampokan dan bentuk-bentuk pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan. Aktor-aktor pemberitaan kriminal tersebut terkonstruksi kembali dalam bingkai informasi lewat media. Dalam penelitian empiris pun terlihat, sebagai contoh penelitian Gerbner (dalam Fiske 2006:198-199) yang menunjukkan bahwa media lebih banyak menampilkan pembunuh dibandingkan korbannya. Selain itu, pembunuh sendiri digambarkan sebagai anak muda dengan kelas ekonomi menengah ke bawah. Riset tersebut mengekalkan bahwa media penuh dengan konstruksi dan identitas orang-orang yang berada dalam sebuah kejadian pun turut dikonstruksi.

Melihat situasi media yang persaingannya semakin ketat dan situasi kebebasan akan informasi yang semakin luas, tuntutan terhadap inovasi media semakin tinggi. Konten maupun bentuk produknya pun semakin variatif. Salah satunya dengan menonjolkan isi atas sebuah fenomena atau kejadian tertentu. Kriminalitas pun menjadi bahan dalam pemberitaan. Berita akan dibuat semenarik mungkin. Sebagai konstruksionis, pemberitaan dalam media sebenarnya adalah konstruksi yang dibentuk melalui tuntutan dan situasi-situasi tersebut, termasuk Koran Harian Berita Kota Makassar. Salah satu contoh konstruksi misalnya, ratusan peristiwa kriminal yang terjadi di Sulawesi Selatan. Pekerja media akan menyeleksi, peristiwa mana yang akan ditampilkan. Peristiwa yang ditampilkan tersebut akan digambarkan seperti apa, bagian

mana yang akan ditonjolkan dalam pemberitaan, siapa yang akan menjadi narasumber. Nah, yang menjadi titik tekan penelitian ini adalah, bagaimanakah aktor-aktor dalam peristiwa tersebut diperlihatkan dalam media. Pilihan-pilihan tersebut sebagai sebuah seleksi pekerja media terhadap isi media.

Dari situ kita bisa melihat melalui kacamata paradigma kritis dan diharapkan bisa menyentuh sisi konteks dalam proses analisisnya. Bahkan, diharapkan dapat melihat signifikansi ideologis dalam proses produksi yang dilihat (Tuchman,1999) termasuk pemahaman atas fenomena kriminalitas dalam masyarakat dan kriminalitas dalam pemberitaan. Sebagai alat konstruksi, maka media sendiri punya peran yang signifikan dalam menampilkan subyek dan obyek yang akan dijadikan bahan berita.

Penyiaran berita kriminal memiliki efek yang sulit terhindarkan, yaitu ketakutan masyarakat. Ketakutan masyarakat yang kita kenal dengan *fear of crime* merupakan reaksi emosional yang dicirikan dengan perasaan bahaya dan kegelisahan yang dihasilkan dari tantangan kekerasan fisik (Church Council on Justice and Corrections.(1995)). Sebagai upaya ilustratif, tragedi "*war of the world*", sebuah drama yang disiarkan melalui radio di Amerika pada tahun 1938 yang mengisahkan planet Bumi diserang pasukan dari Mars telah membuat 1 juta lebih warga AS merasa ketakutan. Warga AS pada waktu itu mengira drama yang disiarkan adalah sungguhan lantaran pengisahannya tampak nyata.

Berita kriminal yang di siarkan setiap hari bukan berarti tanpa efek. Mengacu data Kompas yang telah disebut, lebih dari setengah masyarakat Jakarta merasakan ketidak amanan dan ketakutan terhadap kejahatan. Masyarakat setiap hari disuguhi berita tentang pembunuhan, perampokan, kekerasan, dan kejahatan lainnya yang dapat menanamkan cara pandang masyarakat tentang kehidupan disekitarnya. Mengacu pada teori kultivasi yang digagas oleh Profesor George Gerbner pada 1960 ini, media massa dapat menanamkan nilai yang akan berpengaruh pada sikap dan perilaku khalayak. Berita kriminal yang disiarkan dengan intensitas tinggi memperbesar kemungkinan tertanamnya cara pandang dan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan yang ada disekitarnya.

Menarik pula jika kita mengaitkan hal ini dengan teori self fulfilling prophecy yang digagas Robert K. Merton. Teori ini mengatakan seorang yang mendefinisikan sesuatu sebagai kenyataan, maka konsekuensinya adalah kenyataan. Setelah media massa atau berita kriminal yang ditayangkan menanamkan cara pandang masyarakat mengenai kehidupan sekitarnya yang penuh dengan kejahatan, dan masyarakat mengetahuinya, bisa jadi ketakutan masyarakat ini berbuah menjadi kenyataan dan menjadikan masyarakat benar-benar menjadi korban kejahatan.

Melalui *social learning theory*, Albert Bandura menganggap, media massa sebagai agen sosialisasi yang utama disamping keluarga, sekolah, dan peer group. Sosialisasi yang dilakukan oleh media mencakup hampir

seluruh sisi kehidupan masyarakat. Lowery dan Defleur (1983) beranggapan bahwa pesan media merupakan stimuli yang dapat memengaruhi emosi dan sentimen individu. Pengaruh media dalam sikap dan perilaku dapat dipahami dari modelling theory yang menerangkan bahwa individu menerima perilaku yang ditayangkan oleh karakter isi media, dan pada akhirnya individu akan mengikuti “model” perilaku yang disampaikan oleh media massa. Perilaku individu yang seharusnya maupun yang tidak seharusnya dapat dipelajari secara efektif melalui media.

Begitupula perilaku kejahatan atau kriminalitas yang juga dapat dipelajari melalui media. Sutherland melalui differential association theory-nya menganggap bahwa belajar tingkah laku kejahatan sama halnya dengan belajar tingkah laku lain. Sutherland mengatakan bahwa kejahatan dipelajari ketika berinteraksi dengan orang lain dalam proses komunikasi.

Taft dan England (1964) secara tegas mengatakan bahwa surat kabar mengajarkan teknik-teknik kejahatan. Jika kita memperhatikan apa yang diblow up oleh berita-berita kriminal di Indonesia, terutama dalam televisi, diterangkan dengan deskripsi yang jelas dan rinci tentang suatu kasus kejahatan yang terjadi, dari mulai motif hingga reka ulang adegan kejahatan. Reka ulang biasanya menggambarkan bagaimana seorang melakukan aksi kejahatan tersebut. Zulkarmein Nasution juga beranggapan bahwa tayangan kejahatan memberikan inspirasi untuk

melakukan kejahatan itu sendiri. Tidak sedikit kasus kejahatan yang dilakukan karena pengaruh penayangan berita kriminal itu sendiri.

Salah satu bentuk disfungsional media massa kejahatan adalah berita kriminal menyampaikan definisi dan konstruksi terhadap realitas kejahatan dengan proporsi yang tidak tepat. Jika kita mengamati pemberitaan yang ada dalam program-program berita kriminal, terdapat kecenderungan yang mengonstruksi kejahatan sebatas tingkah laku manusia yang merugikan orang lain yang terjadi "dijalanan" dan dilakukan oleh masyarakat kelas bawah dan biasanya dilakukan karena alasan ekonomi.

Konstruksi kejahatan oleh media massa setidaknya sejalan dengan pandangan aliran kriminologi konstitutif terhadap kejahatan. Aliran ini, menurut Pettit (2002), yang dikutip dari "kriminologi-nya" prof. Mushtofa, menjelaskan bahwa pemikiran kriminologi konstitutif dimungkinkan untuk merekonstruksi kebenaran. Terkait dengan kejahatan, menurut kriminologi konstitutif, kejahatan dan pengendaliannya harus ditelaah dalam rangka totalitas konteks semua kebudayaan yang ada. Melalui pandangan ini perlu memperluas pandangan konsep kerugian termasuk semua kekuasaan yang bermaksud menyerang makhluk manusia, tidak semata-mata dibatasi oleh pandangan sempit tentang kejahatan jalanan (Mustofa, 2007).

Berdasarkan teori ini, tingkah laku yang dilakukan oleh mereka yang bukan dari kalangan "jalanan" bila memang tingkah laku tersebut merugikan orang lain namun dilakukan dalam bentuk kejahatan

inkonvensional, maka tingkah laku tersebut layak dikategorikan sebagai kejahatan; sama halnya dengan tingkah laku penodongan, kekerasan, dan kejahatan jalanan lainnya. Tindakan kaum bisnis dan politisi bila mereka merecoki otonomi yang lain akan dapat dikategorikan dalam isu tindakan yang merugikan (Ibid).

Kejahatan adalah suatu definisi tingkah laku manusia yang diciptakan oleh agen penguasa dalam suatu masyarakat yang terorganisasi secara politik (Quinney,1970, dikutip di Mustofa,2007). Pendefinisian atau konstruksi tingkah laku sebagai kejahatan dilakukan lantaran tingkah laku tersebut dianggap akan mengganggu otoritas kelompok dominan. Kelompok yang memiliki kekuatan dominan tersebut secara lugas hanya ditudingkan kepada kelas penguasa kapitalis (Mustofa, 2007). Kualitas pengetahuan masyarakat yang diproduksi oleh media untuk masyarakat sebagian besar ditentukan oleh nilai tukar berbagai kondisi yang memaksakan perluasan pasar, dan juga ditentukan oleh kepentingan ekonomi para pemilik dan penentu kebijakan (Garnham, 1979).

Media, dalam konteks ini berita kriminal, merupakan instrumen penting yang merekonstruksi kebenaran sekaligus menyempitkan definisi kejahatan itu sendiri dengan tendensi untung rugi elit penguasa dan pengusaha. Sadar atau tidak, berita kriminal telah mengonstruksi cara pandang masyarakat terhadap kejahatan. Jika kita meminta intepretasi pada masyarakat awam tentang apa itu kejahatan, maka kemungkinan

besar kejahatan akan diasosiasikan dengan kekerasan, penodongan, pembunuhan, dan kejahatan jalanan lain.

Tidak salah memang. Namun adalah suatu ketidakadilan jika berita kriminal tidak secara proporsional menyiarkan dan memberitakan kepada masyarakat tentang kejahatan “kerah putih” semacam korupsi, kecurangan para pebisnis, hingga peneluran kebijakan yang tidak pro rakyat. Padahal jika kita melihat dari sisi implikasi, jenis kejahatan kerah putih ini lebih luas dampak merugikannya. Sedikitnya porsi pemberitaan “WCC” dibanding “street crimes” membentuk anggapan yang kedua kurang serius dibanding yang pertama.

Aliran Frankfurt memandang bahwa media merupakan sarana utama yang dapat mengokohkan kedudukan dan kepentingan segelintir pemodal dan mengabaikan hak banyak orang. Tampaknya seni murni dan bahkan budaya kritik serta perbedaan pendapat pun dapat dipasarkan untuk memperoleh keuntungan, meskipun harus mematikan potensi kritik (McQuail, 1989). Setiap hal, asal diterima masyarakat akan diliput oleh media lantaran, menurut McQuail, komoditi dalam hal ini berita kriminal merupakan alat ideologi pertama dalam proses tersebut.

Asumsi dasarnya adalah, setiap subyek yang terkait dengan peristiwa atau kejadian, punya hak yang sama dalam pemberitaan di media massa. Penelitian ini dirumuskan dalam sebuah pertanyaan: Misalnya bagaimanakah konstruksi tersangka, korban dan polisi dalam wacana pemberitaan yang dinarasikan pada berita-berita kriminal (headline) di Koran Harian Berita Kota Makassar?

B. Surat Kabar Sebagai Media Massa

Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Media massa sering dibedakan menjadi media massa dalam bentuk tampak (visual) media massa bentuk dengar (audio), dan media massa bentuk gabungan tampak dengar (audio visual). Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak penerima dengan menggunakan berbagai jenis alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio dan televisi (Mulyana, 2001). Anzwar dalam (Novilena, 2004) menyatakan bahwa sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang. Diantara berbagai media massa yang ada, salah satunya yang banyak dimanfaatkan orang dewasa ini adalah surat kabar.

Surat kabar adalah media komunikasi yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk cetak dan foto secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa rubrik yang teratur dan berkesinambungan (Novilena, 2004). Selain itu, menurut (Suangga, 2004) media massa memiliki posisi sentral dalam kehidupan manusia apabila benar-benar dimanfaatkan sebagaimana seharusnya. Oleh karena itu media menawarkan berbagai alternatif, sehingga dapat memilih informasi yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan dan dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyampaikan ilmu, pendidikan, pengetahuan dan sebagainya.

1. Kebutuhan Khalayak pada Informasi Kriminal

Kebutuhan khalayak terhadap informasi kriminal di surat kabar didasari adanya motif-motif khalayak dalam membaca surat kabar. Pada umumnya khalayak menggunakan media massa karena didorong oleh motif tertentu (Rakhmat, 2004). Menurut McGuire (Rakhmat, 2004) mengelompokkan motif dalam dua kelompok besar yakni motif kognitif (berhubungan dengan pengetahuan) dan motif afektif (berkaitan dengan perasaan). Menurut Blumler (Rakhmat, 2001) motif yang ada pada tiap individu sangat beragam, yaitu: informasi (*information*), pengawasan (*surveillance*), hiburan (*entertainment*) dan ketidakpastian (*uncertainty*).

Kebutuhan masyarakat terhadap informasi kriminal juga menyangkut jenis pemberitaan terutama yang mengandung unsur kekerasan atau adanya adegan kekerasan. Hasil penelitian Mazdalifah (1999) berita, film atau sinetron yang bermuatan kekerasan digemari responden yang berusia 7-9 tahun. Alasannya, karena ceritanya seru, banyak berkelahi, tokoh jagoannya jago berkelahi dan punya senjata.

Tingkat kesukaan berita-berita kekerasan oleh khalayak karena frekuensi dan durasi membaca informasi kriminal menyangkut kekerasan yang disajikan dalam bentuk berita di surat kabar dengan memaparkan fakta-fakta dari lokasi kejadian. Menurut hasil penelitian Mazdalifah (1999) adegan kekerasan yang dibaca di surat kabar dan ditayangkan jika ditonton secara teratur dalam waktu yang panjang akan berpengaruh pada pengetahuan anak tentang kekerasan, penumpukkan sikap terhadap perilaku kekerasan dan peniruan terhadap perilaku kekerasan.

2. Efek Berita Kriminal

a. Efek Kognitif

Efek kognitif mengenai berita kekerasan berupa citra atau persepsi yang dibangun khalayak saat dan sesudah membaca surat kabar dan menonton tayangan kekerasan di televisi. Gerbner (Rakhmat, 2004) melaporkan penelitian berkenaan dengan persepsi penonton televisi tentang realitas sosial. Citra tentang lingkungan sosial kita terbentuk berdasarkan realitas yang ditampilkan di media massa. Persepsi tentang dunia dipengaruhi oleh apa yang dilihatnya dalam televisi dan dibacanya di surat kabar. Efek kognitif dari informasi kriminal di media massa meliputi pengetahuan teknis khalayak akan tindak kekerasan. Khalayak yang menyaksikan tindak kekerasan akan mengetahui bagaimana gaya berkelahi, penggunaan senjata, bahkan pelajaran tentang modus operandi kejahatan. Efek kognitif informasi kriminal berhubungan dengan penilaian khalayak mengenai realitas yang ditampilkan surat kabar dan televisi dengan realitas yang sebenarnya.

b. Efek Afektif

Informasi kriminal dan berita kekerasan di media massa telah lama menimbulkan kegelisahan. Menurut penelitian, khalayak yang telah membaca di surat kabar dan menonton tayangan kekerasan di televisi mengalami susah tidur, karena terbayang peristiwa tersebut. Bahkan yang terjadi pada anak-anak dan remaja, adegan tersebut sampai terbawa dalam mimpi. Fenomena tersebut menggambarkan meningkatnya kecemasan pada diri seseorang sesudah menonton tayangan kekerasan

(Arix, 2006) (1). Penelitian yang dilakukan Garbner dan kawan-kawan (McQuail, 2000) menunjukkan bahwa penonton berat tayangan kekerasan di televisi merasa menjadi penakut di dunia. Efek afektif yang dirasakan khalayak mengenai tayangan kekerasan di televisi yakni toleransi khalayak akan tindak kekerasan. Hal ini berarti bagaimana empati khalayak mengenai kekerasan yang terjadi pada realitas di televisi dengan realitas nyata, terutama kepada korban atau pelaku kekerasan. Media televisi dapat memberikan efek yang tajam dari tayangan kekerasan terhadap khalayak dan salah satunya adalah de-sensitization effects, berkurang atau hilangnya kepekaan kita terhadap kekerasan itu sendiri (Pitaloka, 2006).

3. Faktor-faktor Yang Menimbulkan Efek

Menurut Stephen W Littlejohn dalam (Vera, 2002) media massa tidak langsung menimbulkan dampak bagi audiens. Banyak variabel terlibat dalam proses terjadinya efek. Gaver (Rakhmat, 1989) yang dikutip Vera (2002) menyatakan bahwa komunikasi massa terjadi lewat serangkaian perantara. Untuk sampai kepada perilaku tertentu, maka pengaruh ini disaring bahkan ditolak sesuai dengan faktor yang menyertainya, seperti faktor personal dan faktor situasional. Menurut (Vera, 2002) faktor personal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri yang memengaruhi perilaku seseorang, terdiri atas sikap dan emosi. Faktor situasional adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri yang memengaruhi perilaku seseorang. Faktor luar pertama adalah lingkungan masyarakat. Faktor kedua adalah lingkungan keluarga.

Mengacu pada positivis teori kejahatan disebutkan bahwa berkembangnya ilmu pengetahuan alam (Fisika , Kimia, Biologi, Kedokteran) membawa perubahan dalam memandang kriminalitas. Ciri-ciri positivisme adalah mengandalkan metode ilmiah dan perilaku manusia dipandang sebagai fungsi dari kekuatan eksternal yang sering di luar kontrol individu. Beberapa diantaranya adalah (1) Sosial, seperti kekayaan dan strata, yang lainnya adalah (2) Politik dan sejarah seperti perang dan kelaparan. (3) faktor pribadi, seperti struktur otak seseorang dan susunan biologis atau kemampuan mental juga memengaruhi behavior manusia. Teori positivisme kejahatan dianut oleh para ilmuwan barat. K Lavoter (1741-1801) mempelajari fitur wajah penjahat dan menemukan bahwa bentuk telinga, hidung, mata dan jarak antara mereka terkait dengan perilaku antisosial. Franz Joseph Gall (1758-1828) dan Johann K. Spurzhein (1776-1832) mempelajari bentuk tengkorak dan benjolan dikepala dan menyimpulkan bahwa atribut-atribut fisik terkait dengan perilaku kriminal. Philipe Pinel (seorang psikiater) mempelajari kriminalitas dengan kepribadian psychopathic.

Hal ini sejalan dengan kontemporer teori kejahatan. Ada beberapa kekuatan yang menghasilkan kriminalitas. Biologis, kekuatan psikologis, ekonomi dan sosial politik dapat bergabung untuk menghasilkan kejahatan. Garis pemisah antara awal masa dan akhir masa remaja terletak kira-kira sekitar usia tujuh belas tahun, usia saat dimana rata-rata setiap remaja memasuki sekolah menengah tingkat atas. Awal masa

remaja berlangsung kira-kira dari tiga belas tahun sampai enam belas tahun atau tujuh belas tahun, dan masa akhir masa remaja bermula dari usia 16 atau 17 tahun sampai delapan belas tahun (Hurlock, 1980).

Perubahan perilaku mencakup aspek kognisi, afeksi dan aspek konasi. Menurut Winkel dalam (Suharto, 2006) kognisi adalah pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki khalayak. Afektif adalah sikap khalayak mengenai isi surat kabar dan tayangan berita di TV. Konasi adalah tindakan individu menurut cara tertentu. Menurut Hurlock dalam (Suharto, 2006) menjelaskan beberapa pola perilaku sosial pada masa anak-anak hingga remaja yaitu: (1) hasrat akan penerimaan sosial, (2) empati, kemampuan meletakkan diri dalam posisi orang lain dan menghayati pengalaman orang tersebut.

Berita kriminal telah menjadi kebijakan redaksional Harian Berita Kota Makassar. Kebijakan tersebut diambil karena telah menjadi suatu kekuatan yang sudah merasuk ke dalam kehidupan masyarakat di Sulawesi Selatan. Harian Berita Kota Makassar sebagai salah satu media massa lokal memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan media lokal lainnya di Makassar dalam penyampaian pesannya. Salah satu kelebihanannya adalah paling lengkap dalam hal menyajikan unsur pesan dan informasi kriminal bagi khalayak pembacanya dengan slogan "Suara Lokal Pembela Rakyat".

Oleh karena dilengkapi gambar dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan beritanya terasa lebih hidup dan dapat menjangkau ruang

lingkup yang sangat luas. Manajemen redaksional Harian Berita Kota Makassar menilai semakin banyaknya media lokal di Makassar tentunya akan memunculkan persaingan dan situasi yang kompetitif antarmedia surat kabar guna merebut pangsa pasar dengan cara menyuguhkan berita-berita kriminal yang diperhitungkan dan disenangi oleh pembaca.

Untuk dapat menarik perhatian pembaca, konten dan angle berita yang ditawarkan dikemas semenarik mungkin. Berbagai konten berita yang disajikan dikemas dengan memperhatikan unsur informasi, pendidikan serta hiburan. Namun seiring berjalannya waktu dan ketatnya persaingan justru menggeser paradigma pengelola surat kabar untuk menyajikan program pemberitaan yang sehat. Program pemberitaan yang sering muncul di koran justru kurang memperhatikan unsur informasi, pendidikan, sosial budaya bahkan etika dan norma masyarakat. Salah satunya unsur kekerasan dan informasi kriminal menjadi menu utama di berbagai jenis pemberitaan di Harian Berita Kota Makassar yang dikemas dalam bentuk straight news, feature, on the spot, investigasi dan lainnya.

Salah satunya pemberitaan yang mengandung unsur kekerasan dan dikemas dalam bentuk berita kriminal. Hampir keseluruhan berita kriminal yang diberitakan tidak segan menampilkan berita-berita yang menyeramkan langsung dari lokasi kejadian seperti korban kekerasan misalnya ceceran darah, bahkan menggambarkan kronologis kejadian secara lengkap. Saat ini hampir disemua halaman Harian Berita Kota Makassar terdapat berita kriminal dan hukum. Ada yang disajikan dalam

bentuk berita mendalam (indepth news) seperti, “Kisah di Balik Jeruji Besi, “Berita Patroli, “Tim Buru Sergap, dan “Metro Realitas”. Ada pula yang disajikan dalam bentuk berita langsung atau harian (daily news) seperti wawancara langsung dengan Pekerja Seks Komersial (PSK) atau sumber lainnya.

Unsur kekerasan yang terdapat dalam berita kriminal tidak dapat dibendung. Hal ini memicu munculnya faktor penentu perubahan bagi perilaku khalayaknya dalam aspek kognitif, afektif, dan konatif. Alternatif berita kriminal di televisi tentunya akan memberikan pengaruh bagi khalayak pemirsanya, terutama jika berita kriminal yang ditayangkan dinikmati oleh khalayak remaja. Menurut Hurlock (Suharto, 2006) tahap perkembangan anak-anak hingga remaja, pada fase inilah remaja mulai memiliki pola perilaku akan hasrat penerimaan sosial yang tinggi. Khalayak remaja mulai menyesuaikan pola perilaku sosial sesuai tuntutan sosial.

Remaja yang memiliki intentitas menonton berita kriminal mulai menyesuaikan hal-hal yang diterimanya dengan realitas sosial. Sehingga pengaruhnya akan cepat diterima terutama pada aspek kognitif yang meliputi pengetahuan akan kejahatan, aspek afektif meliputi perasaan atau emosi akan tayangan kekerasan bahkan aspek behavioral yang meliputi tindakan untuk meniru adegan kekerasan.

Komunikasi adalah interaksi sosial yang digunakan dalam menyusun makna yang merupakan citra dunia, kemudian individu akan

bertindak berdasarkan makna tersebut (Nimmo, 2000). Muis (1999) merangkum definisi komunikasi dari beberapa terminologi komunikasi, yaitu : (1) komunikasi adalah proses penyampaian pesan antara dua orang atau lebih, (2) komunikasi adalah proses pengiriman lambang-lambang yang mempunyai arti, (3) komunikasi adalah tindakan membagi informasi atau pengetahuan, atau membagi orientasi isyarat-isyarat informasi.

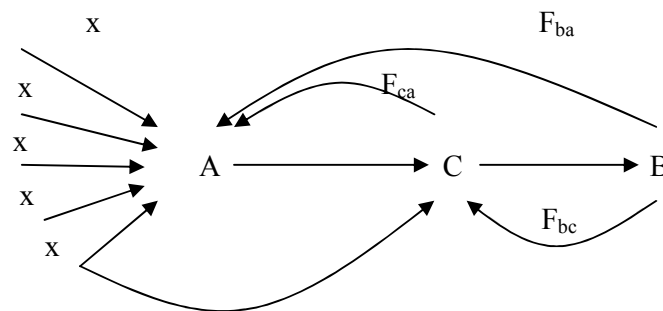
Komunikasi politik adalah suatu kegiatan komunikasi yang mempunyai konsekuensi politik baik secara aktual maupun potensial yang mengatur perilaku manusia dalam keberadaan suatu konflik (Nimmo, 2000). Komunikasi politik berlangsung sebagai suatu proses penyampaian pesan tertentu yang berasal dari sumber kepada khalayak, dengan menggunakan media tertentu, dan untuk mencapai tujuan tertentu (Nasution, 1990).

C. Teori Agenda Setting

1. Konsep Gatekeeper.

Sebelum dipublikasikan menjadi sebuah berita, informasi harus melewati berbagai tahapan seleksi terlebih dahulu. Pada akhirnya, ada informasi yang lolos dari tahap seleksi kemudian diangkat menjadi berita dan ada informasi yang tidak lolos tahap seleksi. Hal ini dikarenakan tak tersedia cukup waktu dan tempat di dalam media massa (Dougnewsom dan Wollert dalam Descartes 2004). Fungsi pengaturan tempat dan waktu ini berkaitan dengan fungsi redaksi sebagai penjaga gawang informasi

(gatekeeper yang menepis berita-berita masuk (Muis, 1999). Media melalui kegiatan yang disebut gatekeeping mengontrol akses khalayak terhadap berita, informasi, dan hiburan (Wilson dalam Descartes 2002).



Teori Gatekeeper (Westley & Mac Lean)

Keterangan

- X = Sumber informasi
- A = komunikator
- C = Gatekeeper
- B = Audience
- F = Feedback

2. Konsep Agenda Setting

Konsep agenda setting juga diajukan oleh Benard C.Cohen dalam tulisannya *The Press and Foreign Policy* pada tahun 1963, ia berpendapat bahwa berita di media massa tidak secara langsung memengaruhi pemikiran khalayak terhadap masalah kriminal, namun berpengaruh kepada subjek apa saja yang akan dipikirkan oleh khalayak (Cohen dalam Descartes, 2004).

Menurut teori agenda setting, dinyatakan bahwa media tidak memengaruhi sikap khalayak, namun media berpengaruh terhadap apa yang dipikirkan khalayak. Dengan kata lain, media memengaruhi persepsi khalayak tentang hal yang dianggap penting. Singkatnya, media memilih

informasi dan berdasarkan informasi dari media, khalayak akan membentuk persepsi tentang peristiwa (Rakhmat, 2002). Teori agenda setting mengasumsikan adanya hubungan positif antara perhatian media dan perhatian khalayak pada suatu peristiwa (Rakhmat, 2002).

a. Macam Agenda

Agenda merupakan seleksi terhadap berita yang ada dari suatu berita menjadi lebih penting dibandingkan dengan berita yang lain (DeFleur dan Denis dalam Descartes, 2004).

Terdapat tiga macam agenda, yaitu (1) Agenda Media, yaitu prioritas media dalam meliputi suatu berita kejadian, (2) Agenda Publik, yaitu tingkat perbedaan penonjolan suatu berita menurut opini publik dan pengetahuan mereka, (3) Agenda kebijakan yang menggambarkan berita dan kebijakan yang dikemukakan oleh politikus (McQuail dan Wimdah, 1995).

b. Variabel Dalam Agenda

Dalam pengujian agenda setting juga dilibatkan beberapa kondisi yang diduga berperan dalam menimbulkan variasi hubungan antara agenda media dan agenda publik. Kondisi-kondisi ini dapat berasal dari stimulus efek komunikasi yaitu penyajian media dan dapat bersumber dari khalayak (Winter dalam Descartes, 2004). Sifat-sifat stimulus menunjukkan karakteristik issues, yaitu: (1) Jarak issue, yaitu apakah

issue itu langsung atau tidak langsung dialami individu, (2) Lama terpaan, yaitu apakah issue tersebut baru muncul atau mulai pudar, (3) Kedekatan geografis, yaitu apakah issue itu bertingkat lokal atau nasional, dan (4) Sumber, yaitu apakah disajikan oleh media yang kredibel atautkah media yang tidak kredibel.

Zucker (Descartes, 2004) menyatakan bahwa sedikitnya pengalaman dari khalayak terhadap suatu hal yang menyebabkan mereka semakin tergantung terhadap media massa sebagai sumber informasi. Philip Palmgreen dan Peter Clarke membandingkan pengaruh agenda setting terhadap berita-berita tingkat lokal dan tingkat nasional. Mereka mengasumsikan bahwa berita-berita pada sistem politik tingkat lokal tidak mempunyai pengaruh yang besar pada khalayak, karena khalayak dapat mengalami peristiwa tersebut secara langsung, disamping itu terdapat saluran interpersonal dengan individu lain di lingkungan tersebut. Untuk berita tingkat nasional, pengaruh media akan lebih besar dibandingkan saluran interpersonal, karena khalayak tidak mengalami langsung peristiwa tersebut, sehingga mereka lebih banyak mendapatkan informasi lewat media, disamping itu media juga akan lebih banyak meliput peristiwa-peristiwa nasional (Palmgreen dan Clarke dalam Descartes, 2004).

Weaver (Descartes, 2004) menyatakan bahwa penggunaan media massa yang tinggi oleh khalayak mempunyai hubungan yang erat dengan peningkatan rasa penting khalayak terhadap berita. Hasil penelitian Mullin (Descartes 2004) menunjukkan bahwa pengaruh agenda setting media massa akan mengalami penguatan sejalan dengan meningkatnya penggunaan media oleh khalayak.

c. Teknik Pengukuran Agenda

Untuk melihat hubungan antara dua agenda, penelitian agenda setting melibatkan dua macam pengukuran. Pengukuran pertama, terhadap agenda media dilakukan dengan analisis kuantitatif. Sedangkan data mengenai agenda publik diperoleh melalui metode survei (Harmayn dalam Descartes, 2004).

Agenda media adalah daftar berita dan peristiwa pada suatu waktu yang disusun berdasarkan urutan kepentingannya. Agenda media terdiri dari pokok persoalan, peristiwa, anggapan, dan pandangan yang memanfaatkan waktu dan ruang dalam publikasi yang tersedia untuk disampaikan kepada publik, (Manhein dalam Descartes, 2004).

Untuk mengukur agenda media digunakan teknik analisis isi, yaitu teknik penelitian untuk uraian yang objektif, sistematis dari realisasi isi komunikasi. Teknik penelitian ini bersifat objektif karena dicapai dengan pembuatan kategori yang jelas. Bersifat sistematis yaitu ada

seperangkat prosedur yang seragam terhadap semua isi pesan komunikasi yang diteliti. Kualitatif berarti adanya pengukuran terhadap isi media dengan indikator seperti frekuensi pemberitaan, panjang berita per sentimeter kolom, pemberlakuan berita dan penempatan berita (Krippendorff, 1991).

Pendekatan dasar teknik ini adalah: (1) Memilih contoh atau keseluruhan isi, (2) Menetapkan kerangka kategori acuan eksternal yang relevan dengan tujuan pengkajian, (3) Memilih satuan analisis isi, (4) Menyesuaikan isi dengan kerangka kategori, per satuan unit yang terpilih, (5) Mengungkapkan hasil sebagai hasil distribusi menyeluruh dari semua satuan atau percontoh, dalam hubungan dengan frekuensi hal-hal yang dicari acuan (Krippendorff, 1991).

Agenda publik dapat diukur dengan empat cara: (1) Pada metode pertama, responden ditanya terbuka, seperti: berita kriminal apa yang menurut responden paling penting dalam untuk dirinya, dan berita kriminal apa yang paling penting dalam komunitas responden saat ini. Jawaban dari jenis pertanyaan pertama menggambarkan agenda intrapersonal sedangkan jawaban dari jenis pertanyaan kedua akan menggambarkan agenda intrapersonal, (2) Metode kedua dilakukan dengan meminta responden untuk memberikan penilaian terhadap berita yang disusun oleh peneliti, (3) Metode ketiga adalah variasi

pendekatan kedua, responden diberikan daftar topik yang dipilih oleh peneliti, kemudian responden diminta merangkingnya berdasarkan kepentingan yang dimiliki responden, (4) Metode keempat adalah dengan menggunakan perbandingan berganda (paired comparison methods). Setiap berita yang sudah diseleksi dipasangkan dengan berita yang lain, dan responden diminta mempertimbangkan setiap pasangan berita untuk mengidentifikasi berita mana yang lebih penting. Ketika semua responden telah ditabulasi, berita diurutkan dari yang paling penting ke berita yang kurang penting (Dominick dan Wimmer, 1987)

D. Hasil Penelitian yang Relevan

Penulis mengambil tema dan metode penelitian ini didasari oleh beberapa penelitian sebelumnya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh *Suherman* pada 2008 berjudul "Sistem Appraisal Berita Kriminal Pada Harian Meteor dan Harian Suara Merdeka". Penelitian ini merupakan tesis yang telah dipertahankan di hadapan tim penguji di Universitas Diponegoro Semarang pada tanggal 21 Juli 2008 dengan mengkaji tentang sistem *appraisal* yang dipakai pada Harian Suara Merdeka dan Harian Meteor dalam berita kriminal agar dapat teridentifikasi kesamaan dan perbedaan kedua harian tersebut dalam hal pemosisian pembaca.

Empat berita kriminal dari masing-masing harian dianalisis dengan menggunakan teori *appraisal* yang menitikberatkan pada tiga ranah: *engagement, attitude and graduation* untuk menjawab tiga permasalahan penelitian yaitu: (1) Jenis piranti *appraisal (appraisal devices)* apa sajakah yang dipakai harian *Suara Merdeka* dalam berita kriminal? (2) Jenis piranti *appraisal (appraisal devices)* apa sajakah yang dipakai dalam harian Meteor dalam berita criminal? dan (3) Apa perbedaan dan kesamaan Sistem Appraisal antara harian Suara Merdeka dan Meteor?

2. Tabloidisasi Media (Kajian Deskriptif *Terhadap Harian Wawasan di Semarang*) tahun 2012 disusun oleh Rahmawati Zulfiningrum pada Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro Semarang. Penelitian ini menyajikan tentang koran tabloid menghasilkan media cetak sebagai media yang bersirkulasi massal. Berisi hiburan, *frivolities of life*, berita ringan, politik populer, beragam informasi ranah privat, pemberitaan penuh warna *crime sex*, serta masalah hidup sehari-hari. Muncul beragam kecemasan keras terhadap industri media cetak yang melakukan praktik tabloidisasi namun juga terdapat dampak positif, karena melalui praktik tabloidisasi selain media cetak dapat meningkatkan oplahnya secara massal juga sekaligus menciptakan panggung public yang populer dan pemberitaanya diminati masyarakat banyak.

3. Pengaruh Terpaan Berita Kejahatan di Televisi Terhadap Sikap Waspada dan Cemas Pada Ibu Rumah Tangga. Tesis ini disusun oleh Hamim pada tahun 2009 dari Unitomo Surabaya. Hasil penelitian ini menjelaskan banyaknya berita kejahatan yang menerpa khalayak maka pada diri khalayak tersebut akan terbentuk realitas sosial, yaitu timbulnya rasa cemas yang kemudian diikuti dengan sikap waspada terhadap lingkungan sekitarnya.

Hipotesis utama yang diajukan adalah terdapat pengaruh terpaan berita kejahatan di televisi terhadap pembentukan realitas sosial pada khalayak.

Pengambilan sampel secara Kluster Ganda Bertahap (Multistage Cluster Sampling) dan alokasi proposional pada setiap strata wilayah penelitian, maka diperoleh sampel minimal sebesar 232 orang dewasa. Uji hipotesis digunakan uji regresi ganda. Dari analisis diperoleh kesimpulan bahwa berita kejahatan yang ditayangkan SCTV dan AN-teve berpengaruh terhadap pembentukan realitas sosial pada masyarakat Surabaya, yaitu dengan munculnya rasa cemas dan sikap waspada pada lingkungan sekitarnya. Kehadiran berita-berita kriminal baik di surat kabar maupun televisi telah memberi pengaruh negatif terhadap pola hidup masyarakat. Masyarakat memiliki kecenderungan ikut mencoba seperti yang mereka baca di koran dan ditonton di tv.

E. Kerangka Pemikiran

Wacana adalah praktik sosial (mengkonstruksi realitas) yang menyebabkan sebuah diskursif antara peristiwa yang diwacanakan dengan konteks sosial, budaya, atau ideologi tertentu (Kriyantono,2006). Melalui pendefinisian tersebut, ada dua hal yang bisa diambil sebagai aspek dalam wacana yakni teks itu sendiri dan konteks yang melibatkan bagaimana teks itu bisa tersedia. Aspek penting yang dimunculkan oleh definisi tersebut adalah bahasa yang digunakan untuk merepresentasikan maksud pembuat wacana. Analisis wacana sendiri merupakan sebuah studi tentang struktur pesan dalam komunikasi (Sobur,2005), penekanannya adalah pada aneka fungsi (pragmatik) bahasa. Untuk memahami wacana yang sesungguhnya diperlukan konteks yang lebih luas, diantaranya pemahaman tentang siapa yang memunculkan teks tersebut seperti menggali dari instistusi media. Analisis wacana disebut juga sebagai sebuah Media Discourse Analysis (Hamad, 2004).

Dikatakan demikian, karena fokus analisis wacana pada dasarnya bersumber pada isi media. Selain itu, analisis wacana juga dipakai untuk menganalisis isi dan struktur media. Untuk menjelaskan isi pesan dalam pemberitaan yang juga termasuk dalam pesan komunikasi diperlukan pemahaman teks dan konteks yang tidak boleh terlepas. Oleh karena itu, beberapa model analisis wacana tidak melepaskan unsur konteks yang melingkupi unsur-unsur pembentuk teks tersebut. Model wacana yang diperkenalkan oleh Van Leeuwen biasanya digunakan untuk melihat suatu kelompok atau suatu aktor yang dimarginalkan posisinya dalam suatu teks

wacana. Suatu kelompok atau aktor tertentu digambarkan secara dominan, sedangkan kelompok lain posisinya dianggap lebih rendah.

Menurut Leeuwen (Eriyanto, 2005), ada dua pusat perhatian dalam pemberitaan, yakni proses pengeluaran (exclusion) dan proses pemasukan (inclusion). Proses pengeluaran terjadi jika dalam suatu pemberitaan, ada kelompok atau aktor yang dikeluarkan dari pemberitaan dengan menggunakan strategi wacana tertentu. Sedangkan proses pemasukan adalah sebaliknya, jika dalam suatu pemberitaan, ada kelompok atau aktor yang terus ditampilkan lewat pemberitaan. Model lain, yang dipinjam dalam menganalisa konteks penelitian ini, adalah model Norman Fairclough.

Ada 3 dimensi dalam analisis wacana yakni: teks, discourse practice, dan sociocultural practice (Fairclough, 1995). Ketiga dimensi tersebut merupakan satu kesatuan utuh untuk bisa melihat dan membongkar struktur pesan serta ketimpangan struktur sosial yang termediakan. Konsep-konsep ideologi pun dimasukkan dalam model ini untuk mengungkapkan makna di balik wacana. Makna sendiri tidak berada dalam teks wacana (Fiske, 2006). Makna dihasilkan dari interaksi antara teks dan khalayak. Produksi makna merupakan tindakan dinamis yang didalamnya setiap unsur bersama-sama memberikan kontribusi. Di sinilah ideologi mulai bekerja, yakni ketika pembaca terjalin dalam relasi hubungan yang menempatkan seseorang sebagai bagian dari hubungan dengan sistem tata nilai yang lebih besar di mana dia hidup dalam masyarakat (Eriyanto, 2005).

Para penganut konstruktivisme beranggapan bahwa segala sesuatu yang nyata sebenarnya hanyalah hasil konstruksi. Dasarnya, setiap individu mendapatkan pengalaman yang berbeda. Surette (2007:34) memberikan pernyataan "*Reality is a collective hunch*" untuk menjelaskan proses konstruksi realitas sosial. Begitu pula dengan berita yang diyakini selalu tidak mencerminkan atau merefleksikan realitas (Potter, 2001). Segala sesuatu yang ada dalam sebuah berita adalah konstruksi dari para jurnalis. Potter juga menekankan bahwa sebenarnya antara informasi yang dikemas dalam program atau cerita entertainment dan berita sama sekali tak ada perbedaan.

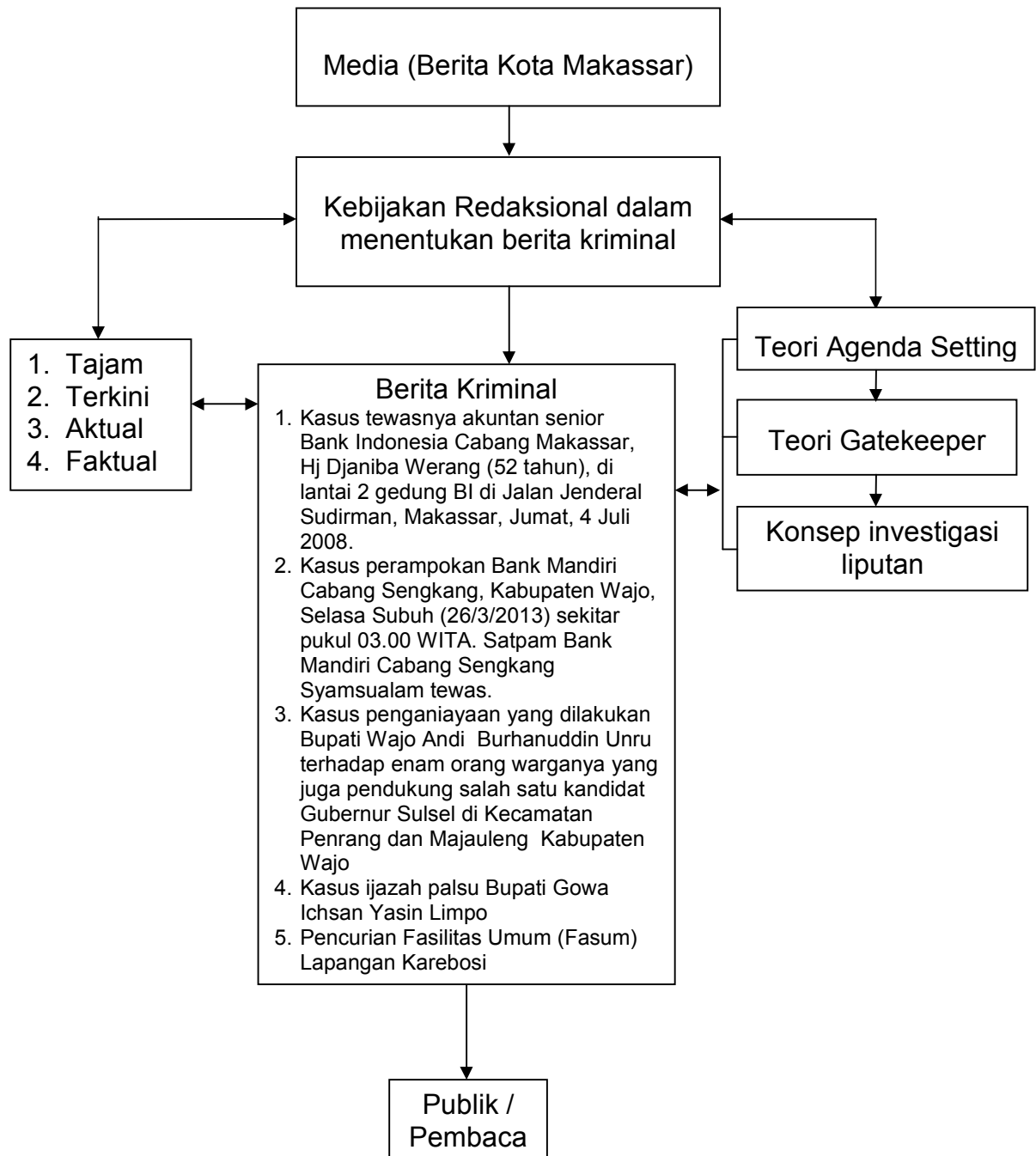
Keduanya adalah hasil konstruksi. Altheide (dalam Potter, 2001) mengatakan bahwa pengaruh yang kuat dalam mengkonstruksi sebuah berita adalah sifat komersial dari media. Altheide lebih melihat pada tekanan ekonomi media. Pada dasarnya, organisasi media adalah sebuah bisnis yang akan selalu bersaing dengan media lain untuk mencari audiens dan pengiklan. Kesuksesan sebuah media seringkali dilihat dari kemampuan sebuah media menarik audiens atau pembaca sebanyak-banyaknya. Apa yang ditampilkan oleh media haruslah profitable atau menghasilkan uang. Tekanan ini dinilai memiliki pengaruh yang kuat.

Berita kriminal adalah berita yang memuat informasi-informasi tentang kriminalitas yang berarti informasi mengenai penyimpangan-penyimpangan hukum dalam masyarakat. Pengertian tersebut didasarkan pada pendapat yang menerangkan bahwa kriminal adalah perbuatan jahat yang dapat dijatuhi hukuman menurut Undang-undang dan merupakan tindakan pidana bukan perbuatan perdata (Salim,1991). Sedangkan

kriminalitas merupakan hal-hal yang bersifat kriminal; perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum pidana dan merupakan kejahatan. Pengertian tersebut dipengaruhi oleh sudut pandang hukum. Dari pandangan sosiologis, kriminal merupakan “*a violation of criminal law for which some governmental authority applies formal penalties*” (Schaefer,2001). Schaefer kemudian menjelaskan bahwa yang disebut kriminal adalah sebuah penyimpangan yang dilakukan seseorang terhadap aturan sosial yang dibuat oleh negara. Istilah kriminalitas sendiri erat kaitannya dengan kata penyimpangan atau deviansi. Dalam kajian sosiologis, orang yang melakukan tindakan kriminal berarti dirinya adalah orang yang melakukan tindakan kriminal.

Jenis kriminalitas sangat bervariasi. Banyak ahli sosiologi-kriminal masyarakat yang mencoba memilah jenis-jenis kriminal, diantaranya: professional crime, organized crime, white collar dan technology-based crime dan victimless crime (Schaefer,2001). Chibnall (dalam Boyle,2005) mengidentifikasi ada 8 nilai berita kriminal. Ini merupakan investigasinya dalam jurnalisme kriminal di Inggris. Depalan nilai berita tersebut adalah: immediacy (*speed, currency*), dramatization (*drama, action*), structured access (*experts, authority*), novelty (*angle, speculation, twist*), titillation (*revealing the forbidden, voyeurism*), conventionalism (*dominant ideology*), personalitation (*culture of personality, celebrity*), simplification (*elimination of shades of grey*).

Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Untuk melihat, mengetahui serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jelas mengarah pada penggunaan metode penelitian kualitatif. Meski demikian, dalam penelitian ini tidak menutup kemungkinan menggunakan cara-cara yang digunakan dalam penelitian kuantitatif, selama dalam menggunakan cara-cara tersebut dipandang perlu oleh penulis untuk memaksimalkan dalam pencarian data dan melakukan analisis.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya (Hadari Nawawi, 1990).

Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian yang non hipotesis sehingga dalam rangka penelitiannya tidak memerlukan perumusan hipotesisnya (Suharsimi Arikunto, 1996). Metode penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan obyek penelitian secara akurat.

Pelaksanaan metode penelitian deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan berpotensi menjadi kunci terhadap apa yang diteliti (Lexy Moleong, 2000).

Dalam Sugiyono (1998), mengatakan bahwa metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti. Studi deskriptif harus lengkap, tanpa banyak detail yang tidak penting dengan menunjukkan apa yang penting atau tidak. Dalam konsep *Grounded Research* bahwa suatu cara penelitian bersifat kualitatif menjadi berpengaruh dengan suatu pandangan yang berbeda tentang hubungan antara teori dan pengamatan.

Mengacu pada tujuan penulisan ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah kerja Surat Kabar Harian Berita Kota Makassar. Selain itu penelitian ini juga akan dilakukan wawancara kepada para pekerja media (awak redaksi BKM), pembaca setia Harian Berita Kota Makassar khususnya pelanggan tetap di dalam dan luar kota serta pembaca atau pelanggan yang bersifat umum.

C. Sampel

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan unit analisis pada Harian Berita Kota Makassar Edisi Tahun 2003–2004, 2007–2008 dan

2011-2012 pada halaman utama, hukum dan halaman kriminal, akan mengkaji tentang dasar-dasar atas kebijakan redaksional media lokal di Makassar atas pilihan redaksi dalam menyajikan informasi kriminal sebagai variabel tergantung (*dependent variable*) dan variabel bebas (*independent variables*) antara lain variabel struktur organisasi, kerjasama dengan instansi lain, kemampuan administratif karyawan dan perencanaan program kerja redaksi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 110 orang dari seluruh jumlah karyawan yang terdiri dari 5 bagian yakni bagian redaksi, iklan, sirkulasi, umum dan bagian keuangan, namun jumlah responden yang ditentukan untuk penelitian ini sebanyak 60 responden. Unit analisis penelitian ini adalah individu karyawan yang berusia 18-40 tahun keatas. Pengambilan sampel dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa usia dewasa berada pada umur 18-40 keatas tergolong pada usia dewasa awal, karena pada usia tersebut merupakan fase penyesuaian mental, pembentukkan sikap, nilai, dan minat baru. Perubahan fisik yang terjadi selama tahun awal dewasa memengaruhi tingkat perilaku individu dan mengakibatkan diadakannya penilaian kembali penyesuaian nilai-nilai yang telah bergeser (Hurlock, 1980). Selain responden juga dipilih sejumlah informan (direksi, komisaris, dan dewan pembaca Berita Kota Makassar) untuk memperoleh gambaran umum mengenai kondisi perusahaan bersangkutan.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh melalui kuesioner dan wawancara. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumentasi.

E. Teknik Analisis Data

Dalam pelaksanaan penelitian, analisis data dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengamatan. Jadi selama proses penelitian berlangsung data yang diperoleh dapat langsung dianalisis. Sesuai dengan metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dari lapangan, teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Melalui teknik ini akan digambarkan seluruh data dan fakta yang diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori-teori yang sesuai.

Selanjutnya analisis data ini akan dilakukan secara induktif, yakni penganalisaan dengan cara menarik kesimpulan atas data yang berhasil dikumpulkan dari yang berbentuk khusus ke bentuk umum, atau penalaran untuk mencapai suatu kesimpulan mengenai semua unsur-unsur penelitian yang tidak diperiksa atau diteliti dalam penelitian ini setelah menyelidiki sebagian dari unsur-unsur tersebut sesuai dengan sampel penelitian yang ditetapkan sebelumnya.

F. Definisi Operasional

Harian Berita Kota Makassar merupakan salah satu media lokal yang menyiarkan berita-berita kriminal adalah kumpulan berita yang dapat dikelompokkan ke dalam suatu kategori. Liputan berita tersebut mencakup berita mengenai lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, militer, kepolisian, badan hukum milik negara, partai politik, lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, keamanan wilayah teritorial negara. Pengaduan kelompok masyarakat terhadap negara, pernyataan pejabat tinggi negara, kebijakan yang dikeluarkan negara, hubungan antardua negara atau lebih, organisasi yang beranggotakan lebih dari dua negara, dan pergantian pemerintahan di suatu negara.

Berita tersebut dipublikasikan harian surat kabar Harian Berita Kota Makassar dengan intensitas dan perlakuan yang berbeda berdasarkan kepentingan yang telah ditetapkan, Surat Kabar Harian Berita Kota Makassar diukur berdasarkan total penilaian dari frekuensi pemberitaan, luas kolom, penempatan berita, perlakuan berita, luas dokumentasi foto, dan luas dokumentasi gambar.

1. Penggunaan media adalah tingkat pemanfaatan media massa oleh khalayak untuk mendapatkan informasi. Penggunaan media diukur berdasarkan sejauh mana responden memanfaatkan media yang digunakan responden pada saat pengukuran agenda media dan intensitas penggunaan media. Berdasarkan hasil pengolahan kuesiner, responden dibagi menjadi dua kelompok. Responden dengan penilaian dibawah rata-rata total nilai digolongkan pada responden sebagai

pengguna media rendah, dan responden yang mendapatkan penilaian diatas rata-rata total nilai digolongkan pada responden sebagai pengguna media tinggi.

2. Kredibilitas Surat Kabar Harian Berita Kota Makassar mencakup tingkat kepercayaan masyarakat Sulawesi Selatan terhadap Surat Kabar Harian Berita Kota Makassar berupa bias berita, akurasi berita, kelengkapan berita, ragam informasi, unsur edukasi dalam pemberitaan, kepercayaan (kebenaran informasi), keberpihakan (netralitas berita), kejelasan berita, penyajian berita, dan kebenaran berita. Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner, responden dibagi menjadi dua kelompok. Responden dengan penilaian di bawah rata-rata total nilai digolongkan pada responden yang menilai rendah kredibilitas surat kabar, sedangkan responden yang mendapatkan penilaian di atas rata-rata total nilai digolongkan pada responden yang menilai tinggi kredibilitas surat kabar Harian Berita Kota Makassar.
3. Kebijakan redaksional Harian Berita Kota Makassar merupakan pandangan dan mengacu dengan penilaian para pembaca mengenai derajat pentingnya berita kriminal. Derajat kepentingan suatu berita kriminal ditandai oleh seberapa penting masyarakat menilai suatu berita kriminal. Semakin tinggi penilaian pembaca terhadap informasi kriminal maka semakin tinggi derajat pentingnya suatu berita kriminal dan ataupun sebaliknya.
4. Penempatan berita diukur berdasarkan lokasi surat kabar meletakkan berita mengenai suatu berita. Untuk berita headline di halaman

pertama diberi nilai tiga, lalu untuk berita halaman pertama diberi nilai dua, kemudian topik berita yang dicantumkan di 'jendela' halaman pertama dan berita headline di halaman dalam di beri nilai satu.

5. Porsi berita adalah persentase satu berita terhadap total ruang (space) pada surat kabar. porsi berita yang dimuat dapat berupa tulisan dan gambar/foto.
6. Frekuensi pemberitaan adalah banyaknya kemunculan suatu berita dalam satu bulan penelitian. Frekuensi dapat diukur berdasarkan jumlah nilai masing-masing berita, dimana setiap kali pemberitaan mengenai suatu berita muncul maka kategori berita tersebut diberikan nilai satu.
7. Aspek/macam pemberitaan adalah aspek yang menjadi titik berat pada suatu berita kriminal.
 - a. *What* (apa). Hal-hal yang menjadi berita politik dalam surat kabar
 - b. *Who* (siapa). Aktor-aktor, tokoh-tokoh atau pelaku yang dalam berita kriminal dalam surat kabar.
 - c. *Where* (dimana). Tempat terjadi suatu peristiwa sehingga menjadi berita kriminal dalam surat kabar.
 - d. *When* (kapan). Waktu terjadi suatu peristiwa sehingga menjadi berita kriminal dalam surat kabar.
 - e. *Why* (mengapa). Penyebab terjadi suatu peristiwa sehingga menjadi berita kriminal dalam surat kabar.
 - f. *How* (bagaimana). Bagaimana suatu peristiwa terjadi sehingga menjadi berita kriminal dalam surat kabar.

8. Nilai berita. nilai berita terbagi menjadi dua yaitu nilai berita yang positif (+) dan nilai berita yang negatif (-). Nilai berita yang positif apabila surat kabar lebih cenderung memberitakan hal/aspek positif dari berita yang disajikan. Nilai berita yang negatif apabila surat kabar lebih cenderung memberitakan hal/aspek negatif dari berita yang disajikan. Nilai berita (+) akan diberi skor dua, sedangkan nilai berita (-) akan diberi skor satu.

Beberapa variabel yang dapat digunakan untuk menjelaskan mengenai Kebijakan Redaksional Harian Berita Makassar dalam Penyiaran Berita Kriminal di Kota Makassar dapat diukur dengan menggunakan beberapa variabel, yaitu variabel bebas maupun variabel terikat. Adapun variabel-variabel tersebut diatas meliputi:

1. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Harian Berita Kota Makassar dengan indikator sebagai berikut :

Produktifitas diamati melalui hasil pelaksanaan tugas yang dibebankan terhadap perusahaan dan dapat diukur dari :

- Kontribusi pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan koran, iklan, kerjasama dengan pihak ketiga serta bergagai kegiatan promosi lainnya.
- Target realisasi dan pertumbuhan pendapatan iklan dan penjualan koran dalam 5 tahun terakhir

2. Variabel bebas dapat diukur melalui:

- a. Struktur perusahaan yang dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator sebagai berikut:

- Penempatan individu sesuai jabatan dengan pendidikannya.
- Pemanfaatan teknologi yang dipergunakan.
- b. Kerjasama dengan instansi lain yang dapat diukur melalui beberapa indikator antara lain:
 - Kerjasama rutin dengan instansi teknis lainnya
 - Sifat hubungan antarbagian dari unit teknis lainnya
- c. Kemampuan administratif karyawan dapat dilihat dan diukur dengan indikator yang meliputi:
 - Keadaan karyawan menurut jenjang pendidikan formal.
 - Keadaan karyawan menurut jenjang pendidikan karier
- d. Perencanaan program kerja dapat dilihat dan diukur dengan indikator yang meliputi:
 - Adanya program kerja masing-masing bagian
 - Adanya pertemuan rutin untuk membahas pelaksanaan tugas.
- e. Kepuasan kerja yang diamati melalui:
 - Lamanya menyelesaikan pekerjaan yang diberikan pada karyawan.
 - Sistem pembagian insentif karyawan dan dasar hukum pemberian insentif

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Harian Berita Kota Makassar didirikan pada tanggal 28 Juni 1970 yang saat itu masih bernama Surat Kabar Umum Bina Baru Ujungpandang dibawa Yayasan Ompo No. SIUPP 094/SK/MENPEN/SIUPP/B.1/1996/ Tanggal 15 Maret 1988 dan No 12 a / PPG / K / 1997/ tanggal 31 Januari 1997. Awal mulanya Surat Kabar Umum Bina Baru terbit sekali dalam sepekan.

Pemimpin Redaksi BKM (Muhammad Arsan Fitri, 2013) Harian Berita Kota Makassar memiliki segmen pembaca dari berbagai kalangan dan strata sosial. Mulai dari pedagang, tukang becak, pegawai negeri sipil, karyawan, akademisi, politisi, eksekutif, profesional, pengusaha, BUMN, BUMD, ibu rumah tangga, TNI/Polri dan lainnya.

Sejak berdirinya, sudah ribuan perubahan (besar dan kecil) dilakukan Harian Berita Kota Makassar. Tapi, melakukan perubahan nama, mungkin sebagai yang paling berani. Dari harian Bina Baru menjadi Harian Berita Kota Makassar. Nama ini terus melekat hingga kini.

Dalam menjalankan usaha penerbitan, Surat Kabar Bina Baru banyak mengalami kendala. Mulai dari masalah permodalan, Sumber Daya Manusia (SDM) hingga pada aspek fasilitas perkantoran. Akibatnya, perkembangan usaha penerbitan kala itu tidak berjalan secara maksimal.

Tapi seiring perjalanan waktu, persoalan tersebut akhirnya dapat diatasi dan Harian Berita Kota Makassar tetap eksis sampai saat ini. Harian Berita Kota Makassar tidak lahir begitu saja. Tentu, terjadi proses yang begitu panjang hingga pada 28 Juni 2013 mendatang berusia 16 tahun. Usia yang sudah cukup matang untuk sebuah perusahaan media.

Mantan Kepala Redaksi dan Redaktur BKM (Wakhyono, Amiruddin Nur, 2013), dulu, awal berdirinya, media ini bukanlah harian. Hanya terbit satu kali seminggu. Namanya Mingguan BINA BARU, berkantor di rumah pemiliknya, Syamsuddin Pallusai di Kompleks Perumahan Toddopuli. Berita-berita yang disuguhkan lebih pada sosial kontrol, permasalahan kemanusiaan dan hukum terutama mengungkap kasus-kasus korupsi.

Tepatnya September 1992, Mingguan BINA BARU ini kemudian bergabung dengan Harian *Fajar*. Kantornya pun pindah, dari Toddopuli ke Jalan Racing Centre, di kantor pusat Harian Fajar. Saat itu, masih tetap terbit sekali seminggu. Namun, sudah mengalami banyak perubahan, mulai dari manajemen hingga penampilan surat kabarnya.

Setahun kemudian, terjadi lagi perubahan. Media ini mulai terbit dua kali sepekan, tepatnya setiap Senin dan Kamis. Lalu, karena mengalami kemajuan yang cukup pesat, maka pada 11 Maret 1997 BINA BARU pun menjadi koran harian, terbit setiap hari Senin hingga Sabtu. Setiap “tanggal merah”, termasuk Minggu, tidak terbit. Kantornya tidak lagi di Jalan Racing Centre tapi pindah ke Jalan Abdullah Dg Sirua.

Sangat serius! Begitulah yang dilakukan ketika berubah dari semula terbit dua kali sepekan menjadi harian. Lihatlah awak redaksinya, yang semula hanya digawangi tak lebih dari delapan orang termasuk redaktur pelaksana dan tiga redaktur, langsung merekrut sekitar 30 wartawan muda.

Kehadiran BINA BARU menjadi sebuah koran harian ternyata mendapat sambutan positif masyarakat, hingga terus berkembang. Apalagi, media ini hadir dengan format baru dan menjadi satu-satunya koran metro di Makassar, bahkan Sulsel. Berita-berita yang disuguhkan saat itu lebih banyak menyangkut dunia kriminalitas, hukum, rumah tangga, dan tentu saja hiburan.

Lagi-lagi, jajaran media ini mengambil langkah yang sangat berani: mengubah namanya. Dari nama Harian BINA BARU menjadi Harian BERITA KOTA MAKASSAR. Ide itu muncul saat berlangsung rapat tahunan yang digelar di Malino pada medio 1999.

Segala sesuatunya pun dilakukan. Lihat saja, betapa seriusnya persiapan yang dilakukan dan betapa intensnya kampanye yang dilancarkan agar pembaca tidak goyah oleh perubahan itu. Saat itu, jajaran direksi selalu berkampanye bahwa Bina Baru adalah Berita Kota Makassar. Dan, Berita Kota Makassar adalah Bina Baru. Sama saja!

Itu baru yang kelihatan dan yang ditujukan kepada pembaca. Yang dilakukan ke dalam jajaran Berita Kota Makassar sendiri, saat itu, tidak kalah intensnya. Jajaran Direksi berkeyakinan, sebuah program yang

besar harus diyakini keberhasilannya yang pertama-tama justru oleh kalangan dalamnya sendiri. Jajaran Berita Kota Makassar tidak boleh tidak satu kata dan satu langkah. Karena itu, kampanye ke dalam jajaran sendiri dilakukan lebih awal. Yang ini, tentunya tidak diketahui oleh pembaca.

Jajaran Berita Kota Makassar sudah sangat biasa dengan perubahan, sehingga perubahan nama ini pun tidak banyak menimbulkan masalah. Memang harus diakui, ada yang ragu-ragu dan khawatir terhadap dampak perubahan nama. Ini wajar karena nama Bina Baru saat itu sudah sedemikian dikenalnya sehingga pertaruhannya juga amat besar. Tingkat keberanian mempertaruhkan sesuatu yang sudah besar memang berbeda dengan ketika media ini masih dalam era “perjuangan untuk hidup”.

Mengapa selalu berubah? Supervisor Berita Kota Makassar. H Syamsu Nur, pernah mengatakan, "koran akan hidup bila selalu ada yang baru, ada perubahan, ada hal-hal yang selalu digali. Tidak monoton."

Inilah yang kemudian mengilhami jajaran Direksi khususnya lingkup reaksional selalu optimis pada setiap perubahan, tentunya ke arah yang lebih baik. Dulu, di awal-awal terbit harian, Berita Kota Makassar dipenuhi dengan berita-berita kriminal maupun peristiwa perkotaan, mulai dari peristiwa heboh, hingga hal-hal yang kecil. Bahkan, kegiatan di kelurahan hingga RT dan RW tak pernah luput dari jepretan wartawan BKM.

Mengapa hingga berita-berita "kecil" seperti itu dimuat? Redaksi BKM beranggapan, dulu orang hanya ingin membaca berita tentang peristiwa yang berada di luar jangkauan. Tapi paradigma itu berubah. Ada kecenderungan, orang tidak hanya ingin membaca berita tentang peristiwa yang berada di luar jangkauannya, tetapi juga ingin membaca berita tentang diri sendiri dan komunitasnya. Ia ingin membaca berita tentang diri dan komunitasnya yang sudah tentu bisa dijangkaunya dengan kemampuan inderanya. Dengan begitu, ada keinginan diri dan komunitasnya tampil menjadi berita.

Ingin tampil dalam berita adalah gejala psiko-sosial. Orang ingin populer, dikenal orang banyak, tidak hanya melalui interaksi sosial langsung, tetapi melalui media massa.

Gejala psiko-sosial juga terlihat pada adanya keinginan orang untuk membandingkan antara realitas dalam kehidupan sehari-hari dengan realitas yang dikonstruksi media. Ini seperti orang yang melihat dirinya dalam foto. Meskipun sudah tahu seperti apa rupa kita sesungguhnya, toh kita ingin tahu seperti apa rupa kita di foto. Dalam konteks media, orang ingin membandingkan realitas empirik dengan realitas media.

Harian Berita Kota Makassar mencoba merespons gejala psiko-sosial ini dengan strategi "pembaca membaca berita tentang dirinya." Kejadian-kejadian kecil dan biasa di sebuah komunitas ditulis sebagai berita, seringkali disertai foto; kemudian koran itu diedarkan di komunitas yang diberitakan itu.

Seorang lurah yang fotonya dimuat di sebuah koran, yang menyertai berita tentang kelurahannya, tentu ia akan membeli koran itu diikuti oleh stafnya, mungkin juga warga kelurahan yang lain.

Dulu, bukan hanya kegiatan RT dan RW yang muncul tapi juga kejadian kecil sekali pun. Bahkan, ada yang berkomentar, "Sandal jepit hilang pun jadi berita". Ya, memang. Sandal hilang pun saat itu diberitakan. BKM pun kemudian menamakan jurnalisme saat itu adalah jurnalisme "sandal jepit".

Dengan kebijakan redaksional seperti itu, maka berita tak hanya memenuhi kriteria layak berita, semisal penting (significance) dan besar (magnitude). Yang lebih diutamakan adalah kedekatan (proximity), yakni kedekatan antara pembaca dengan berita.

Sesuai dengan namanya sebagai koran metro, maka koran Berita Kota Makassar memang harus menguasai kota. Moto bahwa "jangan mengaku orang Makassar sebelum membaca Berita Kota Makassar" benar-benar ditanamkan. Karena itu, tidak boleh ada peristiwa yang terlewatkan, sekecil apapun. Tentu dengan suguhan yang tajam, akurat, lebih lengkap, dan lebih dalam.

Berdasarkan fenomena psikososial seperti itu BKM mencoba membangun sebuah logika, jika seseorang atau komunitas ditampilkan dalam berita, maka orang itu dan orang-orang dalam komunitas tersebut tentu berkeinginan membacanya. Membaca berarti membeli. Jadi kebijakan rubrikasi berdasarkan wilayah administrasi ini adalah strategi pemasaran.

Pada tahun 2005, Berita Kota Makassar tidak lagi berkantor di Jalan Abd Dg Sirua tapi sudah pindah ke Jalan Urip Sumoharjo tepatnya di Gedung Graha Pena Lantai III. Setahun berkantor di Gedung Graha Pena, lagi-lagi sebuah perubahan muncul, terutama soal penampilan koran. Pertengahan 2006 perwajahan dan isi dirombak. Yang semula halaman depan diwarnai dengan berita-berita kriminal dan hukum dengan penataan yang lebih “padat berisi”, tampil lebih elegan. Ibarat gadis, lebih singset. Berita di halaman depan juga tak lagi menonjolkan kriminal, tapi lebih “majemuk”. Namun, bukan berarti media ini meninggalkan ciri lamanya. Berita-berita hukum, kriminal, dan hiburan tetap ada.

Perubahan ini, tentu saja diharapkan akan meningkatkan kualitas, baik dari segi pemberitaan maupun performance (penampilan/perwajahan/layout), dengan tetap mengacu pada motto kami sebagai **SUARA LOKAL PEMBELA RAKYAT**. Tagline ini dipandang sangat pas sebagai koran milik warga Sulsel, khususnya warga Makassar. Slogan ini pula memiliki makna yang dalam, terutama dalam membela kepentingan rakyat dengan menyuarakan setiap permasalahan mereka.

Tagline ini diimplementasikan dalam pengolahan rubrikasi. Makanya, redaksional pun membuka rubrik “Aduan Warga”. Di sini, warga bisa mengadu apa saja, lalu redaksional mencoba menjembatani dengan pihak terkait guna dicarikan jalan keluar akan terus menyuguhkan berita-berita beragam terutama yang terjadi di Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya, seperti kriminalitas, hukum, perkotaan, politik, agama,

pendidikan (edukasi), hiburan, olahraga, dan sosial kontrol yang *akurat, lebih dalam, lebih lengkap*. Ya, ibarat “supermarket” yang menyediakan beraneka macam menu, bukan lagi seperti “butik” yang hanya menyuguhkan satu jenis menu saja.

B. Hasil Penelitian

1. Agenda Media

Agenda media adalah daftar berita dan peristiwa pada suatu waktu yang disusun berdasarkan urutan kepentingannya. Agenda media terdiri dari pokok persoalan, peristiwa, anggapan, dan pandangan yang memanfaatkan waktu dan ruang dalam publikasi yang tersedia untuk disampaikan kepada publik, (Manhein dalam Descartes, 2004).

Pendekatan dasar teknik ini adalah: (1) Memilih contoh atau keseluruhan isi, (2) Menetapkan kerangka kategori acuan eksternal yang relevan dengan tujuan pengkajian, (3) Memilih satuan analisis isi, (4) Menyesuaikan isi dengan kerangka kategori, per satuan unit yang terpilih, (5) Mengungkapkan hasil sebagai hasil distribusi menyeluruh dari semua satuan atau percontoh, dalam hubungan dengan frekuensi hal-hal yang menjadi kerangka acuan (Krippendorff, 1991)

Sebelum dipublikasikan menjadi sebuah berita, informasi harus melewati berbagai tahapan seleksi terlebih dahulu. Pada akhirnya, ada informasi yang lolos dari tahap seleksi kemudian diangkat menjadi berita, dan ada informasi yang tidak lolos tahap seleksi. Hal ini dikarenakan tidak

tersedia cukup waktu dan tempat di dalam media massa (Muhammad Arsan Fitri, 2013). Fungsi pengaturan tempat dan waktu ini berkaitan dengan fungsi redaksi sebagai penjaga gawang informasi (gatekeeper yang menepis berita-berita masuk (Muhammad Syakir, 2013). Media melalui kegiatan yang disebut gatekeeping mengontrol akses khalayak terhadap berita, informasi, dan hiburan (Muhammad Arsan dan Muhammad Syakir 2013).

Di Harian Berita Kota Makassar peneliti melakukan wawancara dengan, Direktur Mustawa Nur, SH, MH, pemimpin redaksi Muhammad Arsan Fitri, SP, MP, wakil pemimpin redaksi Muhammad Syakir, koordinator liputan Ahmad Siddik, S.Ag, koordinator daerah Andi Rustan, Redaktur Kriminal dan Hukum Hamzah Samal, SS. Ahmad dan Hamzah adalah salah satu penentu kebijakan redaksional. Dua anggota redaksi ini adalah anggota terpenting dalam jalannya proses pemberitaan dibawah bimbingan Pemimpin Redaksi.

Struktur Redaksi di BKM adalah sebagai berikut: pimpinan tertinggi di pimpin oleh Pemimpin Redaksi Muhammad Arsan Fitri, SP. MP, Wakil Pemimpin Redaksi Muhammad Syakir, SE, Koordinator Liputan Ahmad Siddik, S.Ag dan Koordinator Daerah Andi Rustan, SS.

Anggota redaksi tertinggi dalam pengambilan kebijakan redaksional ada pada Pemimpin Redaksi. Pada kebijakan redaksional Pemred berperan sebagai penanggung jawab seluruh aktivitas yang dijalankan oleh anggota redaksi yang ada dibawahnya sama halnya yang

diungkapkan oleh Mustawa Nur, SH, MH (Direktur) yang bertanggung jawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja perusahaan dan keredaksian sehari-hari.

Redaktur Kriminal dan Hukum. Sebutan ini untuk orang yang memeriksa berita kriminal dan hukum tetapi bukan dalam arti membiayai atau menanamkan investasi dalam sebuah produksi. Tugas seorang redaktur adalah memimpin seluruh tim di desk kriminal dan hukum agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama, baik dalam aspek kreatif maupun manajemen produksi sesuai dengan yang telah disetujui dalam rapat perencanaan. Selain itu tugas seorang redaktur adalah memantau dan terjun ke lapangan untuk mengarahkan reporter dalam meliput suatu peristiwa. Selain itu redaktur juga mengedit berita yang akan dipublikasikan.

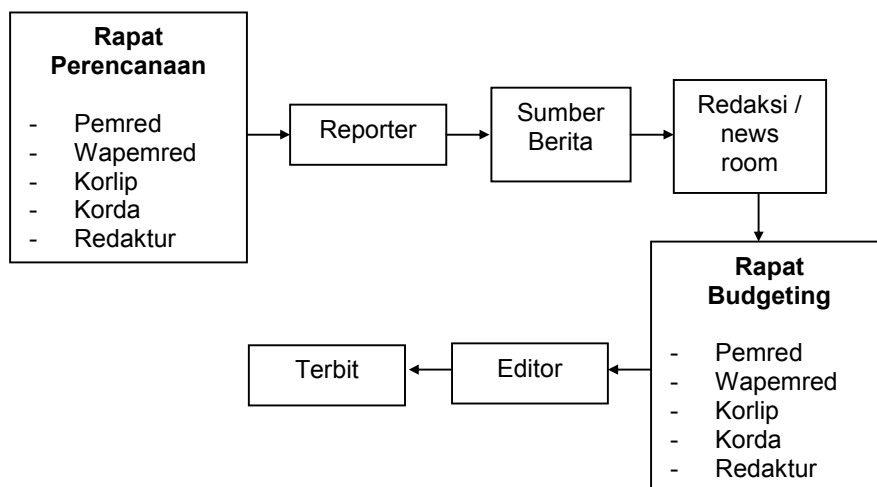
Sedangkan koordinator liputan bertanggung jawab atas kelancaran perencanaan dan pelaksanaan serta memastikan bahwa program yang dibuat memiliki kualitas unggul. Selain itu koordinator liputan juga sering membantu dalam membuat naskah berita dan sekaligus membantu dalam jalannya rapat redaksi

Salah satu anggota redaksi adalah reporter. Tugas dari reporter ialah meliput suatu peristiwa yang terjadi di Makassar dan sekitarnya yang dipimpin oleh koordinator liputan (*korlip*), sedangkan koresponden memperoleh berita diluar Makassar dipimpin oleh Koordinator Daerah (*korda*). Proses alur berita pada kebijakan redaksional. Pada awalnya

reporter yang dipimpin koordinator liputan (*korlip*) dan koordinator daerah (*korda*) bekerja sama dengan koresponden daerah dimana mereka mengumpulkan bahan berita yang terjadi di lapangan.

Berita yang berhasil diliput oleh tim liputan di lapangan dan kerja sama dengan koresponden, lalu kumpulan berita tersebut diserahkan kepada koordinator liputan dan dibawa ke rapat redaksional yang dihadiri oleh pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi, korlip, korda dan para redaktur.

Seluruh anggota redaksi dalam rapat redaksi membahas berita apa yang akan dipublikasikan sesuai dengan besar dan kecilnya peristiwa. Setelah pembahasan selesai, redaktur menentukan berita yang akan naik atas tujuan yang ditetapkan bersama.



Gambar 4.1 Alur Perencanaan Pemberitaan
(Sumber: Muh. Arsan Fitri, Pemimpin Redaksi Harian Berita Kota Makassar, 2013)

Peneliti melakukan wawancara dengan seluruh nara sumber mulai tanggal 14 April-13 Mei 2013 dengan waktu yang berbeda. Wawancara kepada narasumber ini bertempat di kantornya masing-masing.

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas maka peneliti menampilkan data yang menggambarkan tentang judul yang diteliti. Ada lima berita menarik yang sempat menjadi tarik ulur terkait dengan kebijakan redaksi untuk menerbitkan berita tersebut karena banyaknya akan tentang berkepentingan di dalamnya: Mulai dari komisaris, direksi maupun di tingkat redaktur.

a. Rampungan Kasus Pegawai BI Kejepit Lift

MAKASSAR, BKM - Kejaksaan Negeri Makassar meminta kepada penyidik kepolisian agar merampungkan berkas kasus tewasnya staf akunting Bank Indonesia Makassar, Ny Djaniba Werang (50). "Sampai saat ini kasus Ny Djaniba belum lengkap karena penyidik kepolisian belum bisa merampungkan penyelidikannya," kata Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Makassar Andi Muldhani, Minggu (23/5/2010).

Dalam penyelidikan dan penyidikan polisi akhirnya ditetapkan satu tersangka yakni penanggungjawab lif Bank Indonesia (BI), Su. Su disangkakan dengan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan meninggalnya seseorang.

Kasus tewasnya Ny Djaniba belum bisa dilimpahkannya ke Pengadilan Negeri Makassar karena pasal yang disangkakan terhadap

tersangka Su, penanggungjawab lif BI yakni pasal 359 KUHP tidak mempunyai kesesuaian dengan kematian korban.

Hasil penyelidikan polisi, korban meninggal karena terjatuh dari lantai dua dengan posisi sangkar lift yang masih berada di atas sedangkan pintu lift terbuka. "Dalam penyidikan itu, belum ditemukan adanya hubungan sebab akibat antara pasal yang disangkakan kepada tersangka dengan meninggalnya korban, apalagi beberapa alat bukti tidak memenuhi unsur untuk dilimpahkan ke PN Makassar," katanya. Dia mengaku, polisi sudah empat kali melimpahkan kasus tersebut ke Kejari Makassar, namun semuanya dikembalikan karena tidak adanya bukti baru yang ditemukan.

Pelimpahan pertama terjadi September, 26 Oktober, 26 November tahun 2008 dan 3 Maret 2009. Pelimpahan berkas itu semuanya dikembalikan kepada penyidik Polda Sulselbar. Sebelumnya, Djaniba ditemukan dalam keadaan sekarat dan terjepit di bawah lif lantai satu, 5 Juli 2008 dini hari dan langsung dibawa ke RS Akademis untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah mendapatkan perawatan medis di ruang ICU selama dua hari akhirnya korban dipindahkan ke kamar isolasi hingga menghembuskan nafasnya terakhir 7 Juli 2008.

b. Polisi Selidiki Tindak Kriminal di Balik Kematian Pegawai BI

MAKASSAR, BKM -- Polisi terus menyelidiki berbagai kemungkinan di balik peristiwa yang dialami Dzaniba. Termasuk apakah wanita pegawai BI Sulawesi Selatan (Sulsel) itu sengaja dibunuh atau tidak. Hal tersebut

diungkapkan Kapolwiltabes Makassar Kombes Pol Burhanuddin Andi di kantornya, Jalan Ahmad Yani, Makassar, Sulsel, Rabu (9/7/2008).

"Saat ini yang kita lakukan adalah bagaimana kita dapat mencari petunjuk yang mengarah ke kriminal. Bukan mencari pelaku kriminal," ujar Burhanuddin. Menurut Burhanuddin, langkah itu diperlukan untuk memastikan penyebab terjatuhnya Dzaniba merupakan tidak kriminal atau bukan.

"Kita tidak mungkin membiarkan pelaku kriminal berkeliaran," ujar Burhanuddin. Dzaniba adalah staf akunting Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan. Dia ditemukan tergeletak dengan kondisi mengenaskan di bawah lift kantornya pada Jumat 4 Juli. Namun setelah mendapat pertolongan medis, wanita tersebut meninggal dunia.

c. Diduga Pakai Ijazah Palsu, Masyarakat Desak Bupati Gowa Diperiksa

MAKASSAR, BKM -- Aliansi Rakyat Gowa mendesak Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi agar memeriksa Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo dalam dugaan penggunaan ijazah palsu. Ketua Perwakilan Aliansi Rakyat Gowa Akib Sijaya yang ditemui di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulsel, Senin (6/2/12) mengatakan, ketidakpastian hukum akan kasus yang melilit Ichsan Yasin Limpo telah menghambat kinerjanya.

"Dia bahkan tidak leluasa berjalan di wilayah kerjanya, karena sering diteriaki, kami sebagai masyarakat Gowa hanya ingin kepastian hukum, apakah benar ijazah yang digunakan Ichsan itu palsu atau tidak," kata dia.

Kepolisian dan Kejaksaan menurutnya harus tegas dalam menangani kasus ini. Bahkan, sudah dua tahun lebih surat izin pemeriksaan bupati kepada predisen diajukan belum juga turun. "Yang menjadi korban adalah masyarakat, karena terjadi konflik dingin di Gowa," ujar Akib yang membawa rombongan 50 orang setelah berdemo di Kantor Mapolda Sulselbar.

Sekadar diketahui, dugaan penggunaan ijazah SLTP oleh Bupati Gowa awalnya diungkap oleh LSM Gempar, saat pemilihan Bupati Gowa 23 Juni tahun lalu. Bahkan LSM Gempar melaporkan temuan tersebut ke KPU dan Polres Gowa. Setelah dilakukan penyelidikan lebih jauh, dalam kasus ini ditetapkan tiga orang sebagai tersangka yakni Gasing Daeng Kulle, Takdir, dan bekas Kepala Sekolah SMP Jongaya (kini SMPN 27 Makassar). Hasil penelitian Laboratorium Forensik juga menunjukkan bahwa ijazah itu palsu.

Hanya saja, hingga kini baik rencana dari Polda untuk memeriksa Ichsan Yasin Limpo belum diutarakan. Kepala Seksi Ekonomi dan Moneter Kejati Sulselbar Syamsul Kasim yang menerima Akib dan rombongan mengaku, akan segera mengakomodir tuntutan masyarakat Gowa. "Tapi kuncinya disini ada di polisi, kami hanya eksekutor dari pengembangan polisi," kata Syamsul.

d. Tersangka Pemalsu Ijazah Kembali Diperiksa

Anggota KPU Gowa Penuhi Panggilan

MAKASSAR, BKM -- Mantan Kepala Tata Usaha SMPN Jongaya (kini SMPN 27 Makassar, red), Gassing Dg Kulle kembali diperiksa, Jumat, 17 September. Pemeriksaan ini sudah keempat kalinya dilakukan penyidik kepolisian. Pemeriksaan kemarin, dalam kapasitas Gassing sebagai tersangka kasus dugaan ijazah palsu SMP milik Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo. Gassing diperiksa di ruang pemeriksaan lantai dua Direktorat Reskrim Polda Sulsel, mulai pukul 10.00 hingga 15.00.

Mengenakan baju safari berwarna hitam, Gassing diperiksa AKP Amiruddin. Dia didampingi Andi Hakim, Humas pasangan calon bupati dan wakil bupati Gowa nomor urut dua, Andi Maddusila Idjo-Djamaluddin Rustam. Pemeriksaan itu berlangsung tertutup. Selain Gassing, penyidik juga memeriksa anggota KPU Gowa, Syarifuddin Kulle yang sempat mangkir dalam pemeriksaan sebelumnya. Syarifuddin diperiksa terpisah di ruang penyidik Unit III Sat I Pidum Jitkaor/JV Dit Reskrim Polda Sulsel.

Ketua tim penyidik kasus IYL, AKP Alexander Yusuf menjelaskan, Gassing diperiksa kali kedua dalam kapasitasnya sebagai tersangka dugaan ijazah palsu IYL. Sementara Syarifuddin sebagai saksi, yang dinilai mengetahui perihal ijazah palsu SMP milik IYL. "Kasus ini masih dalam proses penyidikan. Pemeriksaan sejumlah saksi maupun tersangka semakin diintensifkan," katanya.

e. Dokumen 1975 dan Laboratorium Bukti Ijazah Bupati Gowa Palsu

MAKASSAR, BKM -- Keputusan Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel menerbitkan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3) kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo membuat murka sejumlah pihak. Sejumlah pengacara dan tokoh masyarakat menyatakan akan mempraperadilanakan Kepala Polda Sulselbar, Irjen Pol Mudji Waluyo.

Pengacara Syahrir Cakkari bersama tokoh masyarakat yang mengaku pembuat ijazah palsu Ichsan, Gassing Daeng Kulle, menggelar jumpa pers menyampaikan rencana tersebut di Makassar, Rabu (2/1/2013). "Kami akan mempraperadilanakan Kapolda Sulsel Inspektur Jenderal Pol Mudji Waluyo karena memberhentikan kasus dugaan ijazah palsu Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo," tegas Cakkari.

Mereka juga mengaku akan melaporkan Kapolda ke Divisi Propam Mabes Polri. "Aneh sekali, mengapa Polda mengatakan kasus ini dihentikan karena tidak cukup bukti. Kapolda Sulsel harus diperiksa, pasalnya, 6 Kapolda sebelumnya dalam kasus ini tidak ada yang SP3-kan bahkan ditingkatkan," jelas Cakkari.

Menurut Cakkari, bukti kepemilikan ijazah palsu Ichsan sudah banyak yang terungkap. Apalagi sudah banyak saksi yang sudah diperiksa. "Pembuat ijazah Ichsan itu bahkan mengaku jika ijazah itu palsu. Ini diperkuat dokumen tahun 1975," ujar Cakkari. Dalam dokumen itu, lanjut Cakkari, tidak ada nama Ichsan. Stambuk yang digunakan,

1191, itu atas nama Abdul Rahman bukan Ichsan. "Bukti fisik diduga dipalsukan itu 2005," ungkap Cakkari.

Sebelumnya, Mudji mengatakan siap dipraperadilan jika ada pihak keberatan dengan SP3 kasus yang menyita perhatian publik itu. "Jika ada keberatan kami siap dipraperadilan," kata Kapolda Sulsel, Inspektur Jenderal Pol Mudji Waluyo, beberapa waktu lalu di Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Batua, Jl Urip Sumihardjo, Panakkukang, Makassar.

Mantan Kapolda Maluku ini, mengatakan, pemberhentian dilakukan karena tidak cukup bukti untuk dilakukan atau diteruskan penyelidikannya. "Kasus ini sudah ditangani sejak tahun 2010, kendala penyidik dalam mengungkap kasus banyak," kata Mudji. Polisi sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut. Selain Dg Kulle (pembuat ijazah), Takdir (kurir Ichsan) dan Achyani Natsir (Kepala Sekolah SMPN 27 Makassar-dulu SMP Jongaya) adalah tersangkanya. Selain itu, hasil penelitian Laboratorium Forensik juga menunjukkan ijazah itu palsu.

Hingga kasus itu di-SP3, Ichsan tidak pernah diperiksa. "Ini salah satu keanehan kasus itu, mengapa ini Bupati Gowa tidak pernah diperiksa. Ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih condong berpihak pada penguasa," kata Cakkari.

f. Desak Presiden Keluarkan Izin Pemeriksaan Bupati Gowa

MAKASSAR, BKM -- Setelah menunggu hampir dua tahun, surat izin pemeriksaan dari Presiden SBY untuk Bupati Gowa Ichsan Yasin

Limpo tidak kunjung turun. Alhasil, pengacara dari Gassing Daeng Kulle, tersangka dalam kasus tersebut, mendatangi kantor Sekretariat Negara (Setneg). "Kedatangan kami ke Setneg adalah untuk menanyakan tentang surat ijin dari Bapak Presiden untuk melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo. Karena sudah hampir dua tahun sejak surat permohonan ijin pemeriksaan yang diajukan pihak Mabes Polri, hingga kini, izin itu belum juga diturunkan," kata Syahrir Cakkari, pengacara Gassing Daeng Kulle, usai mendatangi kantor Setneg di Jakarta, hari ini.

Padahal, lanjut Syahrir, dalam kasus tersebut, pihak kepolisian telah menetapkan kliennya sebagai tersangka sebagai pembuat ijazah palsu yang digunakan Ichsan Yasin Limpo, dalam proses administrasi dalam pemilihan Bupati Gowa. "Ini kan tidak adil. Kenapa si pembuatnya saja yang dijadikan tersangka dan diperiksa. Sementara si pengguna, yaitu Bupati Gowa saat ini, meski sudah dijadikan tersangka tapi belum juga diperiksa karena belum turunnya surat izin dari Presiden SBY," kata Syahrir.

Oleh karena itu, Syahrir meminta agar Presiden SBY dapat bertindak bijaksana dengan segera mengeluarkan izin pemeriksaan terhadap Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo. "Sehingga hukum benar-benar dapat ditegakkan terhadap siapapun. Tidak hanya berlaku bagi rakyat jelata seperti klien saya," tandasnya.

Sebelumnya, kasus dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Bupati IYL mencuat setelah Kepala Sekolah (Kepsek) SMP Negeri 27 Makassar (dahulu SMP Negeri Jongaya) Neny Aspirin Thamrin memberikan pernyataan jika IYL tidak pernah menamatkan pendidikannya di SMP Negeri 27 Makassar pada Tahun Ajaran (TA) 1975/1976.

Bukan hanya Kepsek SMP Negeri 27 Makassar yang memberikan keterangan di atas kertas bermaterai, tetapi Kepala Disdik Makassar Mahmud BM juga memberikan keterangan jika IYL tidak pernah menamatkan pendidikannya. Surat itu berisi pernyataan bahwa nama IYL tidak terdaftar dalam peserta ujian di SMP Jongaya 1976. Surat bernomor 4221/VI/SMP 27/2010 tertanggal 7 Juni 2010 ini juga ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Makassar Mahmud BM. Surat dilengkapi dengan stempel SMPN 27 dan Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Karena nomor stambuk yang dimaksudkan 1191 adalah milik salah seorang siswa yang terdaftar saat itu adalah Abdul Rahman kelahiran Sapaya, Gowa yang sudah meninggal dan bukan atas nama IYL.

g. Polda Dituding Ceroboh Hentikan Kasus Ijazah Palsu Ichsan YL

MAKASSAR, BKM -- Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dinilai ceroboh menghentikan kasus dugaan ijazah palsu Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo. Penghentian ini prematur, apalagi dengan menilik pasal-pasal yang dikenakan, sangat tidak sinkron. Pendapat ini diutarakan Muhammad Dahlan, pemohon praperadilan atas Kapolda Sulsel yang

menghentikan kasus ijazah palsu Ichsan YL, melalui kuasa hukumnya, Rahman Sugiono cs di Pengadilan Negeri Makassar, Kamis (17/1).

Di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Makmur, Rahman Sugiono mengungkapkan, penghentian penyidikan kasus ijazah palsu ini menimbulkan banyak tanda tanya besar. Selain penerbitan SP3 yang dinilai terlalu prematur, pasal-pasal yang diterapkan penyidik juga dianggap tidak sinkron. "Pasal 263 ayat (2) dan 266 ayat (2) juncto pasal 55 dan pasal 56 KUHP yang diterapkan kepolisian dalam kasus ini tidak sinkron. Karena dalam pasal tersebut yang terjerat hanya pembuat ijazah serta kurir," terang Rahman.

Seharusnya lanjut dia, polisi menerapkan pasal 263 ayat (1) juncto 263 ayat (2) dan pasal 266 ayat (1) juncto ayat (2) juncto pasal 55 pasal 56 KUHP. Dengan begitu si pengguna ijazah palsu dalam hal ini Ichsan YL juga bisa dijerat. Penerapan pasal-pasal yang hanya menjerat pembuat dan kurir, adalah bentuk pengaburan. Menurut Rahman, kepolisian tidak secara seksama meneliti pasal-pasal itu.

Selain itu dalam gugatannya, penasihat hukum pemohon mengatakan dalam kasus ini, terlapor Bupati Gowa Ichsan YL tidak pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi terlapor maupun sebagai tersangka. "Kami melaporkan Ichsan selaku pengguna ijazah palsu. Namun anehnya, ternyata kepolisian menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini yakni pembuat ijazah bernama Gassing Dg kulle yang

merupakan PNS tata usaha SMP Jongaya Makassar dan dua lainnya merupakan kurir yakni Ahyadi Nasir serta Takdir," paparnya.

Ironisnya, hingga kasus ini berjalan dua tahun, pengguna ijazah palsu yakni Ichsan YL justru tak pernah diperiksa. Begitu ijazah yang dimiliki yang bersangkutan tidak pernah diteliti penyidik. "Ini kan aneh. Masa yang kami laporkan Ichsan YL, tapi justru kurirnya yang jadi tersangka. Terlapor nda pernah diperiksa," tegas Andi Cakra, salah satu pensihat hukum pemohon.

Menurut Andi Cakra, sebuah tanda tanya besar jika yang dilaporkan adalah Ichsan YL, tapi justru polisi hanya berputar pada delik pembuat ijazah palsu. Tidak pada penggunanya. "Ijazah bernomor induk 191 seharusnya nomor induk itu bernama Abdul Rahman bukan nama Ichsan Yasin Limpo. Itu diubah. Jadi polisi seharusnya konsen pada delik aduan yakni kepada terlapor Bupati Gowa sebagai pengguna ijazah palsu," timpalnya.

Diakhir gugatannya, pemohon meminta pengabulan praperadilan kepada majelis hakim serta membatalkan penghentian penyidikan yang telah diterbitkan Polda Sulsel. "Kami meminta kepada majelis agar menerima praperadilan kami dan memerintahkan agar penyidikan terhadap dugaan pengguna ijazah palsu Ichsan kembali diteruskan," harapnya.

Sidang akhirnya ditutup dan akan memasuki tahap dengar pembacaan jawaban dari termohon atas gugatan yang diajukan pemohon.

Pihak Binkum Polda Sulsel AKBP Hidayat, kepada Berita Kota menyampaikan, pihaknya akan memberi jawaban atas kasus ini, besok (hari ini).

"Ya, besok kami beri jawaban," ucapnya singkat.

Ditanya soal tudingan adanya pasal tidak sinkron yang dikenakan penyidik, Hidayat enggan menanggapi lebih jauh. "Besok saja jawabannya. Kami beri jawaban besok di persidangan," tukasnya.

Sementara itu, salah satu tersangka yakni M Takdir De Rosari kini resmi dilantik sebagai pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulsel periode 2013-2017. Pelantikan dilakukan di Baruga Sangiaseri Rujab Gubernur, Jumat 14 Juni 2013 sesuai dengan SK pelantikan yang ditanda tangani Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman dengan nomor SK: 42 tahun 2013. M Takdir ditempatkan sebagai anggota di Biro Umum.

h. Kapolda Sulsel akan Dilaporkan ke Propam

MAKASSAR, BKM -- Pengacara Gasing Daeng Kulle, Syahrir Cakari, akan melapor ke Profesi dan Pengamanan Internal (Propam) Markas Besar Kepolisian jika Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat, Inspektur Jenderal Johnny Wainal Usman, benar-benar menghentikan kasus dugaan ijazah palsu Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo. "Kasus ini tidak bisa dihentikan karena ada syarat dilanjutkan ke penuntutan dan persidangan," kata Syahrir, Kamis, 12 Januari 2012.

Menurutnya, kasus dugaan pemalsuan ijazah ini telah memiliki lebih dari tiga unsur bukti yang ditemukan oleh penyidik. Bukti tersebut di antaranya penetapan tiga tersangka, yakni Gasing Daeng Kulle, Takdir, dan bekas Kepala Sekolah SMP Jongata--kini SMP Negeri 27 Makassar--dan hasil penelitian Laboratorium Forensik juga menunjuk ijazah itu palsu. "Tidak ada alasan atau syarat bagi Kapolda untuk menghentikan kasus ini," kata Syahrir.

Johny mengatakan akan melihat kembali berkas dugaan ijazah tersebut. Namun berdasarkan gelar perkara di Mabes Polri, dia menjelaskan, ijazah tersebut tidak ditemukan adanya kejanggalan. "Jangan paksa saya untuk menjelaskan ijazah tersebut. Saya minta kamu (wartawan) untuk menemui penyidiknya, ya," katanya.

Selain mengadu ke Propam, Syahrir juga akan mengadukan tindakan Kapolda ini ke Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas). Dia mengharapkan pihak Komisi ikut memberikan pengawasan. "Penyidik polisi harus mandiri dalam memproses perkara itu. Jangan mau ditekan dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam kasus ini," katanya.

Kasus ini berawal dari laporan LSM Gempar, saat pemilihan Bupati Gowa 23 Juni tahun lalu. LSM Gempar melaporkan Ichsan Yasin Limpo ke Panitia Pengawas Pemilu dan Polres Gowa karena diduga menggunakan ijazah palsu dalam pencalonannya sebagai bupati Gowa. Kejaksaan beberapa kali mengirim petunjuk ke polda, tapi tidak dipenuhi oleh penyidik.

i. Polda Ngotot SP3 Sah, Kasus Ijazah Palsu Ichsan YL Tak Cukup**Bukti**

MAKASSAR, BKM – Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, menampik penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan penggunaan ijazah palsu Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo, sebagai langkah prematur. Polda menyebut, semua dalil-dalil yang diajukan pemohon tidak berdasar. Laporan penggunaan ijazah palsu adik kandung Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo ini, dipandang tidak disertai bukti-bukti kuat.

"Dalam laporan polisi Nomor Pol LP/430/V/2010/ Sulsel/Res Gowa tanggal 29 Mei 2010 tertulis sebagai pelapor adalah M Dachan. Itu kami anggap mengada-ada dan tidak benar sama sekali, mengingat dalam berita acara pemeriksaan terhadap saksi maupun pelapor tidak pernah menyebutkan adanya pelapor atas nama M Dachan ADP tapi atas nama M Dahlan," usai tim penasihat hukum Polda Sulsel yang diketuai Kombes Pol Setiyono didampingi Kombes Polisi Sigit Tri Hardjanto, AKBP Moh Hidayat dan AKBP Muh Tahir, dalam sidang lanjutan praperadilan atas Kapolda Sulsel di Pengadilan Negeri Makassar, Jumat (18/1).

Sidang kemarin memasuki tahap pembacaan eksepsi oleh tergugat. Sehari sebelumnya, pada sidang yang sama, penggugat atas nama M Dahlan, melalui penasihat hukumnya Rahman Sugiono cs menyebut, penerbitan SP3 kasus dugaan pemalsuan ijazah Bupati Gowa terlalu prematur. Penyidik dinilai ceroboh.

Selain itu, pasal-pasal yang dikenakan kepada terlapor (Ichsan YL) dinilai tidak sinkron. Ichsan yang dilapor menggunakan ijazah palsu, justru kurir dan pembuatnya yang dijerat. Pelapor juga menyesalkan sikap tebang pilih Polda yang tidak pernah memeriksa terlapor dalam hal ini Ichsan YL, baik sebagai saksi maupun tersangka.

"Pasal 263 ayat (2) dan 266 ayat (2) juncto pasal 55 dan pasal 56 KUHP yang diterapkan kepolisian dalam kasus ini tidak sinkron. Karena dalam pasal tersebut yang terjerat hanya pembuat ijazah serta kurir, sementara pengguna tidak tersentuh," terang Rahman.

Penerapan pasal-pasal yang hanya menjerat pembuat dan kurir, adalah bentuk pengaburan. Menurut Rahman, kepolisian tidak secara seksama meneliti pasal-pasal itu. Dalam pembacaan eksepsinya kemarin, Kombes Polisi Setiyono, mengungkapkan berdasarkan uraian sebelumnya, maka kedudukan hukum M Dachan ADP dalam perkara ini tidak jelas apakah selaku pelapor atau sebagai pihak lainnya yang tidak berkepentingan dalam perkara ini. Intinya kata dia, secara yuridis, yang bersangkutan tidak berhak untuk mengajukan permohonan praperadilan atas penghentian penyidikan perkara. "Ini sebagaimana surat ketetapan No. S.Tap/A.302/02/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 dan surat ketetapan No. S. Tap/A.302/03/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 serta surat ketetapan No. S. Tap/A.302/04/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012," paparnya.

Karena itu, kata Setiyono, gugatan pemohon kabur dimana identitas pemohon tidak jelas. Sementara menjawab materi gugatan pemohon atas tindakan penghentian penyidikan terhadap ketiga tersangka yakni Gassing Dg Kulle, Achjani Natsir serta Muh Takdir De Rosari, Setiono kembali menegaskan bahwa penghentian tersebut secara yuridis sah dan sangat tepat.

Alasannya, hingga saat penyidikan dihentikan tidak ditemukan cukup bukti adanya tindak pidana yang disangkakan. "Sebelum penghentian penyidikan perkara, penyidik sudah melakukan gelar perkara sebanyak 4 kali. Dalam proses tersebut tidak ditemukan adanya bukti baru tindak pidana sehingga sepanjang tindakan kami selaku termohon menghentikan proses penyidikan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 109 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal 76 ayat (2) peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana," teranginya.

Menanggapi jawaban termohon, pemohon melalui penasihat hukumnya Andi Cakra cs, mengatakan, akan memunculkan alat bukti pada persidangan lanjutan nantinya yang akan digelar, Senin (21/1).

"Kami akan munculkan alat bukti pada sidang berikutnya," ketus Andi Cakra. Sementara itu pihak pemohon pun berencana juga memunculkan alat bukti yang sah terkait penghentian penyidikan atas ketiga tersangka yang sesuai dengan prosedur hukum yang sah. "Kami

juga akan memunculkan alat bukti penguatan pada sidang berikutnya , "tegas Setiyono.

j. SENGKETA KAREBOSI, BPN Sulsel Buat “KEDER” Investor Masuk Sulsel

MAKASSAR, BKM -- Wali Kota Makassar Ir H Ilham Arief Sirajuddin, MM, menyatakan, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan membuat “keder” investor masuk Makassar maupun Sulawesi Selatan karena tidak ada jaminan kepastian hukum.

Lahan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung saja bisa dijadikan “status quo” oleh BPN Provinsi Sulsel, ujar Wali Kota Ilham Sirajuddin di Makassar, Jumat. Hal itu dikemukakan mengacu proses permohonan hak pengelolaan lahan (HPL) kawasan Karebosi Makassar yang sudah memiliki status hukum tetap melalui putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 366 K/Pdt/2010 tanggal 26 November 2010.

Namun berdasarkan pernyataan Kepala BPN Sulsel Elfahri Budiman akan memasang garis merah dan setelah itu maka kawasan Lapangan Karebosi menjadi ‘status quo’. Segala aktivitas, termasuk kegiatan bisnis tidak boleh dilakukan di dalam kawasan itu, termasuk pusat perbelanjaan Karebosi Link di Perut Karebosi (*under ground*). “Kami akan membuat garis merah agar tidak diganggu gugat sementara, karena Karebosi dalam pengusulan Hak Pengelolaan lahan (HPL). Tidak boleh

ada pergerakan di dalamnya, tidak ada aktivitas jual beli atau bisnis lainnya,” kata Elfahri dan Status Quo tetap berlaku hingga HPL terbit.

Pernyataan Elfahri itu kontradiktif dengan surat Kepala BPN Sulsel kepada Wali Kota Makassar 4 Mei 2012 yang meminta salinan putusan MA yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Makassar untuk kelengkapan dokumen penebitan HPL yang ditandatangani Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah H Andi Indrajaya, SH. Pernyataan status quo dan larangan aktivitas bisnis itu, langsung meresahkan 3.000 pedagang yang berada dalam perut Karebosi (under ground), padahal mereka sudah berdagang di Karebosi tahunan, karena pengusulan HPL itu sudah dilakukan sejak 2007.

Pernyataan Kepala BPN Sulsel atas instruksi Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang menyatakan bahwa hak publik harus dijaga dan BPN tidak boleh mengeluarkan sertifikat secara sembarangan, apalagi bila lahannya jelas milik rakyat. Rakyat jangan kehilangan pantai dan lapangannya.

Menurut Walikota Makassar, dampak dari pernyataan itu akan menjadikan penanam modal keder masuk Sulsel, karena tidak ada jaminan kepastian hukum dan bagi mereka yang sudah terlanjur berinvestasi seperti di Karebosi, bisa saja mereka akan melakukan somasi kepada pemerintah dan meminta untuk mengembalikan semua investasi yang sudah ditanam.

Padahal, Pemkot Makassar tidak melakukan pelanggaran apapun, revitalisasi lapangan Karebosi dilakukan sesuai PP No.6/2006 yang memungkinkan untuk melakukan revitalisasi melalui kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk “bangun-guna-serah” dengan pemanfaatan 25 tahun. Malah sebelum waktu 25 tahun, investor sudah menyerahkan sebagian fasilitas revitalisasi lapangan dan lainnya senilai Rp27 miliar.

Walikota mengingatkan, publik maupun masyarakat umum harus memahami bahwa pembangunan sulit terlaksana kalau mengandalkan dana pemerintah, sehingga pihaknya melibatkan swasta dan ini sudah berlangsung sejak 2007, kenapa sekarang baru diributkan.

Perencana tata kota, Danny Pomanto menyatakan, revitalisasi Karebosi tidak berbeda dengan Senayan di Jakarta. di Senayan ada Jakarta Convention Centre (JCC), Hotel Mulia, Wisma Atlet, Plaza Senayan dan lainnya, lalu mengapa karebosi dipermasalahkan, padahal masyarakat tetap dapat berolahraga di lapangan yang tersedia dan menikmati berbagai fasilitas bisnis di dalam perut Karebosi (under ground) dan tidak saling mengganggu.

Karebosi Link di Makassar, Sulsel, tercatat sebagai “under ground city” pertama di Indonesia, ujar Danny Pomanto yang dikenal sebagai arsitek yang banyak melakukan perencanaan kota di Indonesia.

Kepala Biro Hukum Pemkot Makassar, Apriadi menyatakan BPN Provinsi Sulsel secara hukum tidak memiliki kewenangan memasang

“garis polisi” serta menetapkan status quo. Yang bisa menetapkan status quo hanya putusan pengadilan.

Untuk itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, maupun Menteri terkait diharapkan memantau kebijaksanaan lokal kepala BPN Sulsel yang dapat berakibat investor tidak berminat masuk ke Sulsel, atau yang sudah masuk ke provinsi ini berupaya meninggalkan Sulsel karena tidak adanya jaminan kepastian hukum untuk bisnisnya, ujanya.

Walikota menyatakan kepada ribuan pedagang Karebosi Link untuk tetap beraktivitas seperti biasa dan tidak perlu resah, sebab Pemerintah Kota Makassar tetap akan melindungi hak-hak pedagang yang melakukan usaha di tempat itu.

2. Agenda Publik

Agenda Publik, yaitu media agenda dengan cara tertentu akan memengaruhi dan berinteraksi dengan apa yang menjadi pikiran publik maka interaksi akan menghasilkan agenda publik dan mengarah pada agenda kebijakan. Agenda kebijakan juga dapat dimaknai sebagai agenda publik untuk berinteraksi sedemikian rupa dengan apa yang dinilai penting oleh penentu kebijakan yakni pemerintah dan interaksi tersebut akan menghasilkan agenda kebijakan

Agenda Publik juga berarti *familiarty* (keakraban), derajat kesadaran khalayak akan topik tertentu. *Personal salience* (penonjolan pribadi), relevansi kepentingan individu dengan ciri pribadi; *Favorability* (kesenangan), pertimbangan senang atau tidak

senang akan topik berita. *Agenda Kebijakan: Support* (dukungan), kegiatan menyenangkan bagi posisi berita tertentu; *Likehood of action* (kemungkinan kegiatan), kemungkinan pemerintah melaksanakan apa yang diibaratkan; *Freedom of action* (kebebasan bertindak), nilai kegiatan yang mungkin dilakukan pemerintah.

Di dalam media surat kabar khususnya di BKM pada program berita biasanya ada yang dinamakan segmentasi dalam proses penerbitan. Yang dinamakan segmentasi adalah pengelompokkan-pengelompokkan suatu produk menurut keahliannya atau karakteristiknya. Begitu juga pada program berita yang ada di koran lain, pada proses berlangsungnya penerbitan pasti ada yang dinamakan proses segmentasi.

“Sebenarnya rata-rata program pemberitaan dilakukan seleksi sampai tiga kali. Berita apa yang naik duluan biasanya berita yang paling penting yang naik duluan dan diprioritaskan di halaman utama. Peristiwa besar yang kejadiannya terbaru, dan paling baru waktunya. Misalnya, kejadian tawuran kemarin sore sama kebakaran dini hari tadi. Biasanya waktu yang terdekat itulah yang akan naik duluan sementara berita tawuran dialihakn ke halaman sesuai dengan segmentasi halaman.

Berita merupakan konsumsi publik bagi setiap kalangan, oleh karena itu sifat berita harus aktual agar dapat meyakinkan masyarakat bahwa informasi tersebut masih hangat dan baru. Headline merupakan berita utama yang selalu diterbitkan di setiap halaman.

Peristiwa besar yang akan dijadikan headline biasa sifatnya Aktualitas (*Timeliness*). Berita tak ubahnya seperti *eskrim* yang gampang meleleh, bersamaan dengan berlalunya waktu, nilainya semakin berkurang. Hampir segala sesuatu yang diberitakan dalam surat kabar terjadi hari ini atau kemarin, atau akan terjadi dimasa depan. Persaingan membutuhkan kecepatan.

Masyarakat menghendaki atau lebih tepat membutuhkan agar berita yang ingin mereka ketahui *cepat* mereka baca, untuk melegakan perasaan mereka ketika terjadi bencana, untuk dapat bertindak sebagai warga masyarakat yang melek informasi pada saat-saat dibutuhkan keputusan, untuk menyamakan bagi bisnis dan spekulasi.

“Kalau headline itu lebih apa yang kita jual dari rundown hari itu, jadi biasanya headline itu adalah peristiwa paling besar hari itu. Yang seperti tadi kejadian dan waktunya paling dekat atau paling luas cakupannya. Misalnya: peristiwa perampokan toko emas di Jalan Somba Opu hingga menewaskan pemiliknya dan seorang pembantunya, itu kan berita besar, itu pasti jadi head line”
(wawancara 16 April 2013 di Gedung Graha Pena Makassar)

Satu lagi yang biasanya jadi headline adalah agenda yang memang kita persiapkan untuk liputan, sebelumnya yang tidak berhubungan dengan peristiwa jadi sifatnya *timeliness*, karena setiap hari tidak selalu ada peristiwa besar, biasanya kita sudah antisipasi dengan membuat liputan-liputan yang bersifat agenda yang *timeliness* tadi. Misalnya: agenda metro itu soal pemerintah menerapkan sistem tilang ditempat bagi mobil yang parkir di titik larangan parkir untuk mengurangi kemacetan di

Makassar. Itu kan bukan peristiwa masih nanti, tapi kita sudah mulai dari sekarang. Kalau tidak ada peristiwa yaitu berita agenda itu yang kita jual.

Lalu selain berita utama tadi ada juga berita *feature* pada setiap pemberitaan. *Feature* merupakan salah satu bentuk berita sehingga secara umum, persyaratan sebuah berita berlaku juga pada penulisan *feature*. McKinney menyebutkan, karangan khas merupakan tulisan yang berada di luar tulisan yang bersifat berita langsung dengan pegangan utama 5 W + 1 H.

Feature dalam arti luas merupakan tulisan-tulisan di luar berita, dapat berupa tulisan ringan, berat, tajuk rencana, opini, sketsa, laporan pandangan mata, dan sebagainya. Sedangkan dalam arti sempit, *feature* merupakan tulisan khas yang sifatnya dapat menghibur, mendidik, memberi informasi, dan lain sebagainya mengenai aspek kehidupan dengan gaya yang bervariasi.

Sedangkan yang disebut *feature* bisa berupa berita, bisa juga berupa karangan tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Jika berupa berita, ia bukanlah berita dalam arti yang biasa, bukan sekedar berita faktual, *matter-of-fact news*, melainkan berita yang dibuat menarik dengan dibubuhi unsur *human-touch*, sentuhan perasaan manusia. Itu artinya berita tersebut diolah sedemikian rupa, sehingga layak kelaikannya untuk dimuat dalam media bukan karena berita itu *penting*, melainkan karena berita itu ditulis secara menarik, atau memang beritanya itu sendiri menarik.

“Di BKM awalnya hard news, tengah itu agenda yang sifanya timeliness, dan yang terakhir itu berita-berita ringan seperti feature. Seperti yang tadi misalnya: nenek yang hidup di rumah bersama bebek-bebeknya/warga menemukan ular phyton. Berita yang unik lah yang paling akhir urutannya karena memang banyak juga yang suka membaca berita ringan seperti ini” (wawancara 16 April 2013 di Gedung Graha Pena Makassar)

Pemimpin Redaksi (*Editor in Chief*) bertanggung jawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian sehari-hari. Ia harus mengawasi isi seluruh rubrik media massa yang dipimpinnya. Di surat kabar mana pun, Pemimpin Redaksi menetapkan kebijakan dan mengawasi seluruh kegiatan redaksional. Ia bertindak sebagai jenderal atau komandan yang perintah atau kebijakannya harus dipatuhi bawahannya. Kewenangan itu dimiliki karena ia harus bertanggung jawab jika pemberitaan medianya digugat pihak lain.

Pada tanggal 17 April 2013, peneliti melakukan wawancara dengan Pemimpin Redaksi BKM dan Wawancara kepada Pemimpin Redaksi sebagai *key informan* ini bertempat di kantornya Gedung Graha Pena Lantai III Jalan Urip Sumiharjo Makassar.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, Pemred menganggap kebijakan redaksional pemimpin redaksi masih ada batasanya dan jika ada kesulitan yang di alami anggota redaksi atas peristiwa yang besar barulah pemred turun untuk mengambil suatu kebijakan. Seperti yang dipaparkan oleh Muhammad Arsan Fitri, Pemimpin Redaksi BKM,

“Berita kriminal itu kan program hard news, jadi ya tergantung peristiwanya kalau tidak layak ya tidak akan diterbitkan, nah kalau

di surat kabar tidak sekedar layak peristiwa beritanya, tapi juga layak fotonya”(wawancara 16 April 2013 di Gedung Graha Pena Makassar)

Sebagai pemimpin redaksi, faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan redaksional dalam menyeleksi sebuah berita dan menentukannya ialah faktor *kelengkapan*.

“Faktor-faktor utama itu adalah faktor kelengkapan. Kelengkapan berita misalnya kalau ada narasumber A, harus ada cover both side atau jawaban dari narasumber itu, tetapi intinya berita itu harus lengkap” (wawancara 16 April 2013 di Gedung Graha Pena Makassar)

Dari hasil wawancara peneliti menjelaskan bahwa rapat redaksional biasanya dilakukan dua kali dalam sehari yang dihadiri oleh anggota redaksi. Redaksi adalah bagian orang dalam sebuah organisasi perusahaan pers yang bertugas untuk menolak atau mengizinkan pemuatan sebuah tulisan atau berita. Pertimbangan yang digunakan bisa menyangkut aspek apakah tulisan atau berita itu bernilai atau tidak, menarik tidaknya bagi pembaca serta menjaga corak politik yang dianut oleh penerbitan pers tersebut. Disamping itu, bertugas untuk memperhatikan bahasa, akurasi dan kebenaran tulisan beritanya.

Pada rapat redaksional biasanya dihadiri oleh beberapa anggota redaksi yaitu pemred/wakil pemred, korlip, korda dan redaktur. Namun dalam hal ini pemimpin redaksilah orang yang bertanggung jawab terhadap semua isi penerbitan pers. Pemimpin redaksi adalah orang yang memiliki otoritas tertinggi. Ia bertanggung jawab menjalankan organisasi

keredaksian sehari-hari. Ia juga bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan pada unit kerja yang ada dibawahnya.

Pemred juga menerangkan bahwa untuk program berita biasanya dilakukan rapat redaksional sebanyak dua kali dan lamanya rapat redaksi tidak menentu tergantung peristiwa yang masuk ke meja redaksi.

“Biasanya rapat redaksi diadakan sebanyak dua kali dan biasanya diadakan rapat budgeting dan rapat evaluasi. Rapat budgeting maksudnya ialah item-item yang masuk untuk diterbitkan esok hari, sedangkan rapat evaluasi yaitu mengevaluasi berita yang sudah” dicetak dan anggota redaksi mengusulkan isi apa yang akan digarap esok hari. (wawancara 20 April 2013 di Gedung Graha Pena Makassar)

Sementara itu dalam hal memutuskan berita layak terbit atau tidak, pemred tidak ikut memutuskan melainkan redaktur yang mempunyai wewenang dalam memutuskan, kecuali jika ada peristiwa besar baru pemredlah yang mengambil kebijakan dalam memutuskan berita tersebut untuk diberitakan.

“Biasanya jika peristiwa tertentu saja wapemred memutuskan layak diberitakan. Standar kelayakannya selain topiknya layak juga segi narasi dan foto tidak cacat, misalnya foto tidak gelap, maka berita itu memang layak untuk diterbitkan” (wawancara 21 April 2013 di Gedung Graha Pena Makassar)

Di media surat kabar program berita biasanya ada yang di namakan segmentasi yakni pengelompokkan-pengelompokkan suatu berita menurut keahliannya atau karakteristiknya.

“Di setiap program selalu di bagi segmentasi, dari segmentasi itu ada namanya rundown (urutan acara). Dari segmen itu dibuat rundown. Biasanya untuk berita di halaman utama peristiwa terkini yang paling kuat. Misalnya, ada teroris tertembak di suatu daerah, atau kasus korupsi yang terjadi saat ini, itu mesti di halaman utama. Biasanya berita urutan terakhir

itu seperti feature atau soft news dimasukan di halaman dalam”(wawancara 21 April 2013 di Gedung Graha Pena Makassar)

Sementara itu Wakil Pemimpin Redaksi Muhammad Syakir, SE mengungkapkan pada saat wawancara ia tidak selalu ikut dalam menentukan peringkat dan urutan berita yang akan diterbitkan. Biasanya anggota-anggota redaksi yang lainlah yang menentukan peringkat dan urutan berita contohnya korlip, korda dan redaktur lainnya.

“Anggota redaksi itu semua sudah senior, tidak selalu harus saya yang turun tangan untuk mengatur itu, jadi kan di dalam rapat redaksi ada wakil pemred, korlip dan korda dll. Mereka yang sudah mampu untuk mengatur semua dan tahu batasan-batasannya. Sewaktu-waktu saja pemred turun langsung ke rapat redaksi jika ada peristiwa penting dan peristiwa yang di nilai besar” (wawancara 26 April 2013 di Gedung Graha Pena Makassar)

Jadi jika mereka ada kesulitan biasanya melapor ke pemred. Yang penting berita itu lengkap, layak dan lengkap dalam arti tidak menuduh orang, tidak memihak yang penting itulah. Yang penting sesuai dengan kode etik jurnalistik. Kita kan ada aturannya, setiap kebijakan redaksional berita pasti ada aturan-aturannya, ada kode etik jurnalistik, undang-undang pers itulah yang mengatur kita semua dan tidak lepas dari koridor yang tadi. Pada dasarnya pemred adalah penanggung jawab dari seluruh kegiatan semua anggota redaksi dalam proses peliputan hingga penerbitan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa agenda media redaksi surat kabar Harian Berita Kota Makassar dalam menyajikan informasi kriminal melalui dan penonjolan isu-isu tertentu melalui berita

belum berjalan dengan baik. Hal ini diakibatkan oleh karena adanya intervensi atas kebijakan redaksional Harian Berita Kota Makassar dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan terhadap informasi kriminal yang akan diterbitkan.

Hal yang sama juga terjadi pada agenda publik. Ketika redaksional Harian Berita Kota Makassar merespon atas opini dan sikap masyarakat terhadap sebuah isu dan informasi yang mengarah pada tindakan kriminal dan pelanggaran hukum, secara mengejutkan dan mendadak Direksi langsung turun tangan dan meminta kepada Pemimpin Redaksi dan Wakil Pemimpin Redaksi untuk mempertimbangkan ulang menerbitkan berita tersebut.

Dalam kondisi seperti ini bagian redaksional terkadang diperhadapkan pada dua pilihan yang teramat sulit. Akibatnya, agenda media, agenda publik dan kesesuaian antara agenda media dan agenda publik tentang kebijakan redaksional terhadap informasi kriminal Surat Kabar Harian Berita Kota Makassar tidak berjalan sesuai dengan perencanaan awal.

Hal ini tercermin dari adanya sejumlah informasi kriminal yang sudah ditulis dalam bentuk berita oleh para reporter dan koresponden kemudian diajukan ke rapat budgating dan telah melalui proses editing, gatekeeping dan gatekeeper akhirnya hanya menjadi sampah dan batal diterbitkan karena kerasnya intervensi oleh pihak lain terhadap kebijakan redaksional.

3. Kesesuaian Antara Agenda Media dan Agenda Publik

Kesesuaian antara agenda media dan agenda publik tampak terlihat jelas dari hasil penelitian ini. Peneliti menemukan bahwa kesesuaian kedua agenda tersebut tidak berjalan karena kebijakan redaksional dalam seleksi pemberitaan berita kriminal pada redaksi BKM juga tidak efektif karena adanya faktor interfensi baik dari internal perusahaan maupun pihak eksternal.

Kebijakan redaksional merupakan jantung dari proses yang dilakukan dalam memproduksi isi surat kabar maupun media elektronik televisi, suatu kontrol internal yang berlaku di dalamnya. Kebijakan redaksional ini memengaruhi dan mengontrol isi yang akan diterbitkan pada halaman yang disediakan dalam menjalankan fungsinya kepada masyarakat.

Suatu berita yang diterbitkan, dipilih melalui proses perencanaan dan bahkan hasil kajian yang cukup panjang. Setiap media khususnya media surat kabar BKM dalam pemberitaan biasanya memiliki pedoman atau panduan masing-masing dalam penetapan beritanya, hal ini biasa disebut dengan kebijakan redaksional.

Kebijakan yang dimiliki antara surat kabar satu dan yang lainnya berbeda-beda, semua itu diambil berdasarkan visi, misi serta sikap politik-ekonomi yang digunakan. Kebijakan redaksional inilah yang kemudian menjadi ujung tombak pemberitaan disebuah perusahaan surat kabar

sehingga berita yang ditampilkan memiliki perbedaan walaupun tema yang dibahasnya sama.

Peneliti sengaja memilih BKM sebagai lokasi penelitian yang terkait dengan informasi kriminal dalam konteks kebijakan redaksional media lokal di Makassar. Hal ini didasari oleh karena surat kabar BKM merupakan media lokal yang mengedepankan program berita kriminal dan hukum dibanding dengan media lain.

Dari lima kasus kriminal yang dipaparkan diatas, peneliti menemukan bahwa kebijakan redaksional Surat Kabar Harian Berita Kota Makassar belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini terjadi karena masih adanya interfensi pihak luar termasuk dari jajaran direksi terhadap sebuah peristiwa yang akan diberitakan. Dalam sehari, dari enam halaman yang diperuntukan bagi berita kriminal dengan alokasi 30 berita, yang termuat hanya 20-an berita. Selebihnya setelah melalui gatekeeping dan gatekeeper hanya menjadi sampah.

Intervensi juga tidak hanya datang dari jajaran direksi dan komisaris tapi juga lingkup redaktur. Hubungan emosional dengan objek yang akan diberitakan menjadikan program pemberitaan tidak dijalankan sesuai dengan perencanaan malam dan pagi hari. Bahkan saat proses peliputan dan produksi berita, tekanan kepada reporter yang ditugaskan mengawal kasus tersebut diminta untuk tidak terlalu mendalam dalam melakukan investigasi.

Kondisi ini bahkan sudah berlangsung sejak 10 tahun terakhir. Redaksi Harian Berita Kota Makassar selalu diperhadapkan pada dua pilihan yang cukup sulit dalam menghadapi intervensi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Tapi meskipun demikian, Pempred selaku pengendali aktivitas keredaksian sehari-sehari tidak menerima begitu saja atas berbagai tekanan yang ada.

Setiap informasi dan berita yang masuk ke redaksi tetap diajukan ke rapat perencanaan dan budgating apakah informasi tersebut sudah layak diberitakan atau tidak. Apakah intervensi pihak lain terhadap sebuah berita dikabulkan atau tidak. Jika hal tersebut ada kaitannya dengan masalah periklanan dan omset koran, maka kebijakan yang diambil adalah tetap memuat berita itu tapi diletakan di halaman dalam dengan penjudulan yang relatif sederhana. Tidak bombastis seperti ketika diterbitkan di halaman utama. Rapat yang membahas tentang adanya intervensi pihak luar redaksi terhadap sebuah kasus yang akan diberitakan dilakukan pada malam hari pukul 19.00 Wita, dirapat perencanaan pagi hari pukul 10.00 Wita dan rapat budgating pukul 14.00 Wita. Pada tahapan budgating semua persoalan pemberitaan sudah rampung mana yang akan diberitakan dan mana yang tidak jadi diberitakan dan keputusannya diambil melalui proses musyawarah mufakat oleh seluruh peserta rapat yang terdiri dari Pemimpin Redaksi, Wakil Pemimpin Redaksi, Koordinator Liputan, Koordinator Daerah dan para redaktur.

C. Pembahasan

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa aspek yang secara signifikan memengaruhi kebijakan redaksional sehingga agenda media, agenda publik dan kesesuaian antara agenda media dan agenda publik tidak berjalan secara maksimal.

Intervensi baik dari internal perusahaan maupun eksternal dapat memengaruhi kebijakan redaksi dalam melakukan perencanaan dan budgating pemberitaan setiap hari. Akibatnya, berita-berita kriminal yang menjadi perhatian publik dan layak jual terpaksa batal diterbitkan. Kinerja redaksi menjadi tidak berjalan sesuai dengan program, perencanaan juga menjadi lemah.

Tidak hanya sampai disitu, hasil wawancara dalam bentuk naskah bertutur antara penulis dengan informan perlu dimaknai dan dinarasikan, sehingga data tersebut mempunyai arti dalam menjawab pokok masalah. Setelah penulis melakukan wawancara terhadap enam informan berdasarkan metodologi yang digunakan, maka berikut hasil data yang telah dinarasikan sebagai berikut:

Hasil wawancara dan Deskripsi Narasi

Muhammad Arsan Fitri (Informan 1)

Informan pertama ini adalah sosok yang sangat berperan aktif terkait dengan kebijakan redaksional dalam hal penentuan berita yang akan diterbitkan. Meskipun kewenangannya masih ada batasanya tapi

tetap saja finalisasi sebuah berita yang akan diterbitkan tetap berada dalam pengawasannya selaku pemimpin redaksi. Seperti yang dipaparkan oleh Muhammad Arsan Fitri.

“Di saat tertentu saja. Kalau memang lagi diperlukan atau kalau ada peristiwa besar saja, jadi kalau berita biasa Pemred tidak terlalu dilibatkan karena berita yang akan naik menjadi wewenang redaktur dan korlip, namun disini yang memutuskan redaktur, korlip hanya memantau saja” (wawancara, 17 April 2013 usai shalat magrib di ruang kerjanya)

Dalam hal kebijakan redaksional pemred hanya akan mengambil tindakan dan kebijakan jika ada peristiwa yang sangat besar dan penting seperti kejadian dan waktunya paling dekat atau paling luas cakupannya. Misalnya pembunuhan di lift Bank Indonesia, kasus ijazah palsu Bupati Gowa H Ichsan Yasin Limpo, penganiayaan yang dilakukan oleh Bupati Wajo Burhanuddin Unru pada salah satu pendukung Calon Gubernur, pembunuhan mahasiswa UMI dan pencurian brankas Polda Sulsel. Itu adalah contoh berita besar dan pasti pemred akan ambil bagian dalam rapat redaksi.

Sedangkan anggota redaksi lainnya seperti reporter, sekretaris redaksi, redaktur, dan yang lainnya bekerja pada posnya masing-masing, seperti sekretaris redaksi contohnya dia sifatnya lebih ke administratif, yang tidak berhubungan langsung dengan konten berita itu sendiri, dia hanya mengurus hasil penerbitan, memfasilitasi nara sumber yang ke kantor BKM, atau wartawan yang akan liputan diluar kota dan harus meminta surat tugas melalui sekretaris redaksi.

Sementara itu reporter serta camera person (*campers*) itu wajib sifatnya, karena tanpa mereka tak akan ada liputan dan informasi yang didapat dari lapangan, mereka berperan mulai dari riset materi sampai ke lapangan, lalu membuat naskah dan mengirim foto sampai ke pos production editing. Jadi struktur pemberitaan dipegang oleh satu redaktur dibantu tujuh reporter dengan beban tugas mengedit naskah dan mengevaluasi foto.

. Muhammad Syakir (Informan 2)

Informan kedua penelitian ini adalah Muhammad Syakir. Beliau dipilih sebagai informan karena posisinya sebagai Wakil Pemimpin Redaksi (Wapimpred) dan memiliki peran yang sama dengan Pempred dalam hal pengambilan kebijakan redaksi terkait dengan berita yang akan diterbitkan.

“Pemred dan Wapemred hanya memantau saja selebihnya diperlukan jika ada peristiwa atau berita yang besar kasusnya baik di Makassar maupun di luar Makassar, sebagai contoh kasus pembunuhan satpam Bank Mandiri Cabang Sengkang dan Kasus Ijazah Palsu Ichsan Yasin Limpo” (wawancara, 19 April 2013 usai shalat ashar di ruang rapat redaksi)

Meskipun pada setiap berita yang akan diterbitkan posisi Pempred dan Wapemred lebih banyak melakukan pengawasan tapi pada saat-saat tertentu jika ada berita (besar) menarik perhatian publik maka keduanya harus terlibat langsung. Ketika terjadi intervensi maka kedua sosok inilah

yang paling banyak berperan. Keputusan sebuah berita akan diterbitkan atau tidak ada ditangan mereka berdua.

Sebagai Wakil Pemimpin Redaksi, ketika diwawancarai oleh peneliti mengutarakan bahwa dalam hal kebijakan redaksional wapemred tidak terlalu berwenang dalam seleksi pemberitaan berita kriminal.

“Saya hanya terlibat kalau ada intervensi terhadap sebuah kasus besar yang akan diberitakan. Tapi keputusan diambil di rapat redaksi. Biasanya kalau berita itu sudah menyentuh wilayah iklan, langganan beritanya langsung disetop atau ditarik ke halaman dalam dengan postur berita lebih kecil dan judulnya tidak terlalu vulgar” (wawancara, 19 April 2013 usai shalat ashar di ruang rapat redaksi)

Kedekatan penulis dengan Muhammad Syakir terjadi sekitar 10 tahun lalu saat masih mahasiswa di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Dengan sikapnya yang konsisten setiap saat dalam pengambilan kebijakan maka sangat sulit untuk bisa dengan mudah mengintervensi pemberitaan terutama pada kasus-kasus besar.

Tapi sayangnya, sikap konsistensi seorang Syakir, begitu biasa disapa mentah ditengah jalan ketika intervensi itu sudah masuk ke wilayah direksi. Maka disinilah terkadang komitmennya dalam mengawal sebuah kasus yang menjadi sorotan publik dipertaruhkan. Bahkan berdasarkan penuturannya saat wawancara dengan penulis, pria asal Bone ini beberapa kali dicopot dari jabatannya sebagai Wapemred hanya karena mempertahankan pendapatnya dengan ‘melawan’ kebijakan direksi dalam mengintervensi sebuah kasus yang akan diterbitkan.

“Demi mempertahankan jurnalisme murni saya selalu siap dicopot kapan saja. Itu konsekuensi dari sebuah jabatan yang mesti dihadapi setiap saat”(wawancara, 19 April 2013 usai shalat ashar di ruang rapat redaksi)

Redaksi dalam sehari melakukan dua kali rapat yang biasanya dihadiri oleh Pimpinan Redaksi, Wakil Pimpinan Redaksi, koordinator liputan, koordinator daerah dan para redaktur. Rapat redaksi ini terdiri dari rapat perencanaan, budgeting atau rapat evaluasi. Rapat budgeting maksudnya ialah untuk menentukan berita apa saja yang sudah terhimpun kompartemen berdasarkan laporan reporter di lapangan, baik itu koordinator liputan (*korlip*) maupun koordinator daerah (*korda*), tim kreatif dan fotografer ikut bergabung dalam rapat ini untuk memberi masukan.

Mustawa Nur (Informan 3)

Dalam prosedur kebijakan redaksional, redaktur berhak dan berwenang dalam menentukan hasil rapat budgeting dan menentukan berita yang akan dijadikan headline atau berita utama pada berita awal hingga berita pada urutan akhir dengan jenis berita masing-masing.

Sementara untuk monitoring terhadap reporter yang sedang meliput di lapangan tetap dilakukan oleh redaktur. Lalu rapat evaluasi biasanya dilakukan setelah koran terbit, ini bertujuan untuk mengoreksi hasil pemberitaan yang sudah dilakukan hari itu. Tujuan lainnya adalah untuk mempersiapkan berita apa yang akan naik esok hari. Sedangkan rapat

proyeksi bertujuan untuk menentukan berita apa saja yang akan disajikan hari itu, serta memprediksi berita khususnya lanjutan berita sebelumnya.

“Jadi alurnya adalah sebelum reporter berada di lapangan, redaktur dan korlip sudah menentukan apa yang akan diterbitkan untuk berita besok hari, jadi setelah hari ini terbit, diadakan rapat evaluasi sekaligus membahas pemberitaan besok harinya. Nah, di rapat evaluasi ini sudah ketahuan yang akan terbitkan esok hari. Biasanya ada empat berita dari Makassar dan dua dari daerah. Setelah rapat selesai korlip dan korda mendistribusi penugasan ke reporter dan koresponden lalu korlip merequest ke masing-masing redaktur untuk dimasukkan ke dalam proyeksi harian” (wawancara, 21 April 2013 usai shalat dhuhur di mushalla Graha Pena)

Dari hasil wawancara dengan Mustawa terungkap bahwa kepala redaksi dalam menentukan layak terbit suatu berita hanya kasus-kasus tertentu saja, seperti apa saja yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Dari sudut mana angle suatu berita yang harus diliput. Itulah sebagian dari suatu kebijakan pemred yang kaitannya dengan kebijakan redaksional di redaksi.

“Biasanya memang juga ada intervensi dari luar terutama pada kasus-kasus tertentu. Kalau ada kaitannya langsung dengan iklan dan langganan koran maka kami rembukan bersama dan memutuskan tidak memuat berita tersebut meskipun tengah menjadi sorotan publik. Sebut misalnya kasus penganiayaan Bupati Wajo terhadap warganya yang juga pendukung salah satu calon Gubernur di Kabupaten Wajo ” (wawancara, 21 April 2013 usai shalat dhuhur di mushalla Graha Pena)

Dalam hal intervensi sebuah kasur besar yang tengah menjadi perhatian masyarakat luas agar berita seorang pejabat publik tidak diterbitkan sudah sering terjadi dalam sebuah perusahaan surat kabar.

Hal ini kemudian menjadi sebuah pertarungan reputasi bagi perusahaan media dalam memposisikan dirinya sebagai media yang independen.

Pada berbagai kesempatan intervensi dari pihak eksternal membuat perencanaan berita di redaksi menjadi berantakan. Banyak berita menarik yang akan diterbitkan tapi karena arus kepentingan pihak luar begitu besar masuk meja redaksi sehingga berita tersebut batal diterbitkan.

Padahal sebenarnya semua berita yang ada sudah memenuhi unsur kelayakan sebuah berita yakni: (1). Berita harus akurat, (2). Berita harus lengkap, adil, dan berimbang, (3). Berita harus objektif, (4). Berita harus ringkas dan jelas, (5). Berita harus hangat.

Dalam prakteknya setiap berita yang akan diterbitkan suatu kebijakan redaksi diputuskan berdasarkan news room. News room terdiri dari pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi, korlip, dan redaktur. Redakturlah yang paling berwenang dalam memutuskan layak terbit suatu berita untuk esok hari, terkecuali jika ada peristiwa besar dan penting baru pemimpin redaksilah yang mengambil suatu kebijakan dalam menentukan berita tersebut untuk diterbitkan atau tidak.

Dalam kasus-kasus tertentu tetap harus menyesuaikan dengan kebijakan perusahaan atau menyesuaikan dengan kebijakan KPI atau yang menurut sudut pandang kemanusiaan itu tidak memungkinkan. Misalnya redaktur lagi mengedit berita tiba-tiba ada reporter datang, lalu memberi tahu ada banjir bandang di Sinjai sedang terjadi, lalu menurut dia

berita itu harus naik. Jadi pemred tidak secara langsung yang menentukan ya atau tidaknya. Karena rata-rata redaktur sudah mengerti batasan-batasan mana yang boleh diterbitkan segera dan mana yang tak layak terbit, makanya ada rapat budgeting disitu untuk diputuskan.

Ahmad Siddik (Informan 4)

Ahmad Siddik adalah menjabat sebagai koordinator liputan. Beliau dipilih sebagai informan karena posisinya yang sangat strategis sebagai koordinator liputan, maka semua penugasan bagi reporter dalam hal pemberitaan menjadi tanggung jawabnya. Posisinya yang sangat sentral inilah sehingga banyak kebijakan redaksi lahir dari gagasannya yang cerdas.

Pada suatu hari tepatnya hari Senin ada sidang kasus ijazah palsu Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo di Pengadilan Negeri Makassar. Karena berita tersebut sangat menarik dan sudah sejak lama menjadi sorotan publik maka sebagai Korlip langsung menugaskan dua wartawannya ke pengadilan untuk meliput dan melakukan investigasi secara mendalam terhadap kasus tersebut. Ketika pada sore harinya dilakukan rapat budgeting berita yang didapatkan pada saat sidang di pengadilan sudah dinyatakan lengkap beserta foto-foto hasil persidangan. Karena beritanya sudah lengkap maka diputuskan akan diterbitkan di halaman utama.

Tapi apa yang terjadi , disaat semua awak redaksi sibuk berburu dengan deadline tiba-tiba ada informasi dari direksi melalui telepon bahwa

berita hasil sidang kasus ijazah palsu harus dibatalkan. Pertimbangannya, jika tetap dipaksakan terbit maka langganan koran di Pemkab Gowa yang jumlahnya mencapai 200 eksamplar setiap hari akan dihentikan. Iklan Pemkab ke BKM juga akan disetop.

“Terpaksa berita itu kami batalkan dan dicarikan berita lain. Padahal semua data dan foto yang dibutuhkan sudah lengkap. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa,”

Dari hasil wawancara dengan Ahmad Siddik cukup jelas bahwa intervensi pemberitaan lebih banyak terjadi karena persoalan kepentingan pihak yang berkasus dan menjadikan iklan dan langganan koran sebagai *bargaining position*. Meski berada pada posisi yang sangat dilematis tapi sebagai bawahan tidak memiliki kekuasaan untuk menolak perintah direksi terkait dengan pesanan agar berita tersebut tidak diterbitkan.

Andi Rustan (Informan 5)

Key informan kelima ini adalah seorang redaktur senior di Berita Kota Makassar dan juga alumni Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Makassar. Namanya dipilih sebagai informan karena pengalamannya yang sudah puluhan tahun bekerja di Berita Kota Makassar. Andi Rustan mengetahui banyak hal terutama bagaimana kebijakan redaksional dalam menghadapi intervensi eksternal terhadap sebuah berita yang akan diterbitkan. Menurutnya, tidak sedikit nara sumber mengancam untuk tidak lagi beriklan dan berlangganan di Berita Kota Makassar baik atas nama pribadi maupun institusi jika permintaanya ditolak.

Kondisi seperti ini memaksa jajaran redaksi harus serba hati-hati dalam mengambil kebijakan terutama dalam hal pemberitaan. Disatu sisi media harus tetap mengedepankan independensinya dalam mengontrol aktifitas pemerintahan sehingga tidak merugikan masyarakat tapi disisi lain juga diperhadapkan pada aspek ekonomi. Dimana media hanya bisa eksis karena peran publik dalam beriklan dan berlangganan koran.

“Redaksi memang selalu diperhadapkan pada situasi sulit seperti ini. Tetap menjaga independensi dan kehilangan pelanggan ataukah tetap mengedepankan keinginan pihak tertentu dengan mengorbankan idealisme” (wawancara pada tgl 25 April 2013 di ruang redaksi BKM)

Dari hasil wawancara tersebut diatas menunjukkan betapa derasnya arus intervensi pihak eksternal kepada Berita Kota Makassar. Pertimbangan teknis yang diambil adalah agar proses pengawasan terhadap sebuah kasus dan independensi media tetap terjaga, redaksi memutuskan tidak menerbitkan berita tersebut ke halaman utama tapi ditarik ke halaman dalam dengan space yang relatif kecil dan judul tidak lagi menonjolkan objek berita yang sesungguhnya.

“Hanya itu yang bisa dilakukan redaksi dalam rangka menjaga idealisme dan independensi sebuah media” (wawancara pada tgl 25 April 2013 di ruang redaksi BKM)

Banyak pengalaman yang terjadi ketika sebuah kasus besar yang menjadi sorotan publik lalu dipaksakan untuk tetap diberitakan. Selain adanya pencopotan jabatan pemimpin redaksi juga omzet iklan langsung

menurun drastis. Apalagi objek pemberitaan yang berkasus merupakan pengiklan terbesar di Berita Kota Makassar.

Hamzah Samal (Informan 6)

Hamzah Samal adalah redaktur Kriminal dan Hukum di Berita Kota Makassar. Hamzah memiliki peran strategis dalam hal pemberitaan berita-berita kriminal. Sebagai editor, Hamzah tahu betul mana berita yang tengah menjadi sorotan publik dan layak diterbitkan di halaman utama dan mana yang tidak. Bahkan berkat kecerdasannya dalam melakukan pemetaan terhadap berita-berita kriminal dan hukum sehingga keputusannya banyak dijadikan rujukan pada setiap pengambilan keputusan di rapat redaksi.

Mantan wartawan senior Pedoman Rakyat ini dikenal tegas dan sangat keras dalam hal adanya intervensi dari pihak eksternal terhadap sebuah pemberitaan. Bahkan siap pasang badan agar berita-berita menarik yang tengah menjadi sorotan publik tetap diterbitkan.

"Saya selalu pasang badan kalau ada intervensi dari pihak luar. Karena ini menyangkut kewibawaan redaksi sehingga tidak bisa diveto begitu saja kebijakan redaksi"(wawancara, 25 April 2013)

Narasi dari informan ini menggambarkan bahwa intervensi pihak eksternal sangat mengganggu perencanaan di redaksi. Mereka menggunakan berbagai macam cara agar berita yang akan diterbitkan dibatalkan. Gagal memengaruhi kru redaksi, para objek berita ini kemudian masuk melalui pintu direksi. Disini kemudian, direksi sebagai

pemimpin tertinggi memainkan perannya dalam mengintervensi kebijakan redaksi.

Bahkan tidak tanggung-tanggung, direksi menggunakan kekuasaannya untuk menggagalkan berita-berita tersebut untuk tidak diterbitkan. Jika ada kru redaksi yang menolak keputusan direksi, maka sanksinya sampai pada pencopotan dari jabatannya.

Dalam analisis agenda setting juga dilibatkan faktor intervensi terbukti membuat agenda media dan agenda publik menjadi lumpuh. Kondisi ini berasal dari stimulus efek komunikasi yaitu penyajian media, dan dapat bersumber dari khalayak (Winter dalam Descartes, 2004). Sifat stimulus menunjukkan karakteristik issues, yaitu: (1) Jarak issue, yaitu apakah issue itu langsung atau tidak langsung dialami individu, (2) Lama terpaan, yaitu apakah issue tersebut baru muncul atau mulai pudar, (3) Kedekatan geografis, yaitu apakah issue itu bertingkat lokal atau nasional, dan (4) Sumber, yaitu apakah disajikan oleh media yang kredibel ataukah media yang tidak kredibel.

Zucker (Descartes, 2004) menyatakan bahwa sedikitnya pengalaman dari khalayak terhadap suatu hal menyebabkan mereka semakin tergantung terhadap media massa sebagai sumber informasi. Philip Palmgreen dan Peter Clarke membandingkan pengaruh agenda setting terhadap berita-berita tingkat lokal dan tingkat nasional. Mereka mengasumsikan bahwa berita-berita pada sistem politik tingkat lokal tidak mempunyai pengaruh yang besar pada khalayak, karena khalayak dapat

mengalami peristiwa tersebut secara langsung, disamping itu terdapat saluran interpersonal dengan individu lain di lingkungan tersebut. Untuk berita tingkat nasional, pengaruh media akan lebih besar dibandingkan saluran interpersonal, karena khalayak tidak mengalami langsung peristiwa tersebut, sehingga mereka lebih banyak mendapatkan informasi lewat media, disamping itu media juga akan lebih banyak meliput peristiwa-peristiwa nasional (Palmgreen dan Clarke dalam Descartes, 2004).

Weaver (Descartes, 2004) menyatakan bahwa penggunaan media massa yang tinggi oleh khalayak mempunyai hubungan yang erat dengan peningkatan rasa penting khalayak terhadap berita. Hasil penelitian Mullin (Descartes 2004) menunjukkan bahwa pengaruh agenda setting media massa akan mengalami penguatan sejalan dengan meningkatnya penggunaan media oleh khalayak.

Proses peliputan berita kriminal ditangani oleh Koordinator Liputan (Korlip), jika liputan berita terjadi di wilayah Makassar. Serta koresponden dan reporter yang diteruskan kepada Koordinator Daerah (Korda). Baru setelah itu Korda dan Korlip membuat daftar belanja yang berupa kumpulan naskah berita dalam hal ini adalah bahan-bahan produksi berita.

Selanjutnya proses produksi diawali dari rapat seluruh tim peliput, kemudian redaktur akan memilih berita yang akan diterbitkan. Setelah itu

tim akan membuat rundown untuk penerbitan berita. Naskah yang sudah terkumpul akan diedit oleh redaktur. Naskah sudah edit akan diteruskan untuk di lay out. Tim inilah yang bekerja dan mempersiapkan mengenai proses peliputan hingga penyeleksian berita (*getkeeper*).

Berita yang baik adalah hasil perencanaan yang baik. Prinsip ini berlaku bagi berita yang sifatnya diduga. Kita harus bisa mencari dan menciptakan berita. Proses pencarian dan penciptaan berita itu dimulai di ruang redaksi melalui forum rapat proyeksi. Istilah lain dari rapat proyeksi adalah rapat perencanaan berita, rapat peliputan, atau rapat rutin reporter dibawah kordinator liputan (*Korlip*).

Proses peliputan hingga penyeleksian berita pada berita kriminal harus melalui beberapa tahapan internal sesuai dengan kebijakan redaksinya. Berita yang diangkat tidak sembarangan dipilih tetapi ditentukan setelah melewati berbagai macam pertimbangan oleh beberapa anggota redaksi seperti pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi, redaktur, hingga reporter senior. Karena berita kriminal merupakan program news unggulan di BKM, jadi seluruh anggota redaksi tidak asal mengangkat suatu berita tanpa melihat nilai dan kualitas berita tersebut mulai dari *hard news* hingga *soft news*.

Nilai-nilai berita itu tidak lebih dari pada asumsi-asumsi intuitif wartawan tentang apa yang menarik bagi khalayak tertentu, yakni apa

yang mendapat perhatian mereka, sehingga sebagian dari mereka menikmati informasi yang ada pada program pemberitaan tersebut.

Teori *gatekeeper* yang mengasumsikan bahwa berita sebelum terbit harus melalui penjaga gawang, gawang yang dimaksud adalah gawang dari sebuah media massa seperti Redaktur Pelaksana, Korlip dan Pemimpin Redaksi. Sedangkan arus berita internal dua tahap mengasumsikan sebagai revisi dari teori *gatekeeper*, disini dijelaskan bahwa pemberitaan yaitu pengumpulan bahan berita dan pengolahan berita. Dari kedua teori ini, teori arus berita internal dua tahap Bass adalah yang paling sesuai dengan alur berita yang dilakukan di BKM.

Tindakan gatekeeping dalam proses peliputan berita kriminal sudah terlihat dari awal pemilihan isu yang terjadi di dalam wilayah maupun di luar wilayah. Koresponden yang dipimpin oleh kordinator daerah yang bertugas meliput langsung tentunya menyeleksi berita apa saja yang layak diberitakan, sedangkan reporter yang berada di dalam wilayah Makassar dan dipimpin oleh kordinator liputan sebelum memilih isu melakukan riset terlebih dahulu kemudian barulah akan dihasilkan kira-kira berita kriminal seperti apa yang akan diangkat.

Tahap berikutnya, berita yang sudah ditentukan itu dibawa kedalam rapat internal redaksi yang biasanya dihadiri oleh pemimpin redaksi, wakil memimpin redaksi, redaktur pelaksana, korlip, korda, dan para redaktur jika diperlukan yang kemudian akan dibahas pada rapat proyeksi. Pada

tahapan ini merubah atau menggabungkan bahan-bahan awal menjadi hasil akhir.

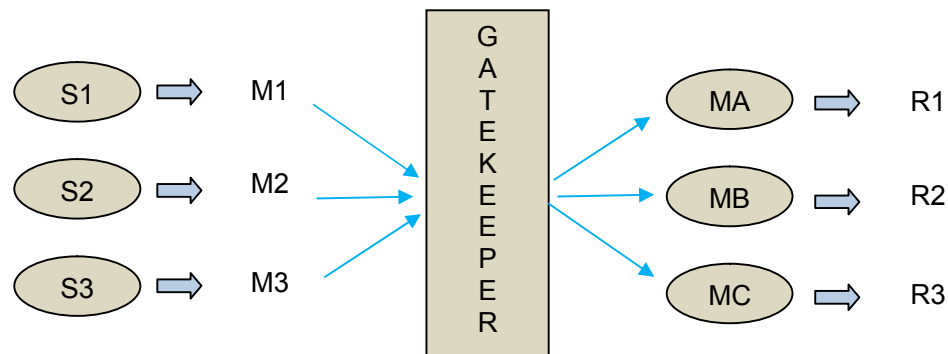
Hasil dari pengamatan dan wawancara peneliti pada tanggal 14 April-20 Mei 2013, Redaktur Kriminal dan Hukum yang bernama Hamsa Samal berperan menjadi *gatekeeper* pertama. Selain itu Pemred juga bisa menjadi *gatekeeper* pertama tetapi jika ada peristiwa besar dan penting saja, selebihnya redaktur yang berwenang yang menjadi *gatekeeper* utama.

Disini, Hamsa Samal sebagai redaktur menyeleksi berita apa saja yang akan diangkat, biasanya tidak semua berita yang dibuat oleh reporter akan lolos pada tahap selanjutnya. Setelah mendapatkan isu yang menarik, Hamsa membawanya ke ruang rapat redaksi. Dalam rapat redaksi akan dibahas tentang kelayakan suatu berita untuk diterbitkan atau tidak diterbitkan. Apakah ditebitkan di halaman utama atau halaman dalam. Proses pemilihannya tergantung dari jenis berita apakah masuk kategori *hard news* atau *soft news*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa ternyata kebijakan seorang pemimpin redaksi dalam susunan anggota keredaksionalnya tidak selamanya digunakan. Kebijakan Pemred tidak selalu dibutuhkan sebab yang berwenang langsung terhadap peliputan hingga penyeleksian berita kriminal itu menjadi wewenang redaktur.

Terkecuali jika sewaktu-waktu ada kejadian atau peristiwa yang besar dan luas cakupannya baru seorang pemred akan mengambil kebijakan atas kejadian yang terjadi. Jadi jika tidak ada peristiwa besar, maka kebijakan ada ditangan redaktur dan pemimpin redaksi yang sifatnya hanya memantau dan membantu redaktur.

Pertimbangan dalam menentukan berita hard news hingga soft news pada berita kriminal melalui tahapan seperti yang tercantum pada teori gatekeeper dan teori arus berita internal dua tahap bass.



Gambar 4.2 Fungsi gatekeeper atau palang pintu
(Sumber: Joseph A. Devito, Komunikasi Antar Manusia, Bandung: Simbiaosa Rekatama Media. hlm. 43)

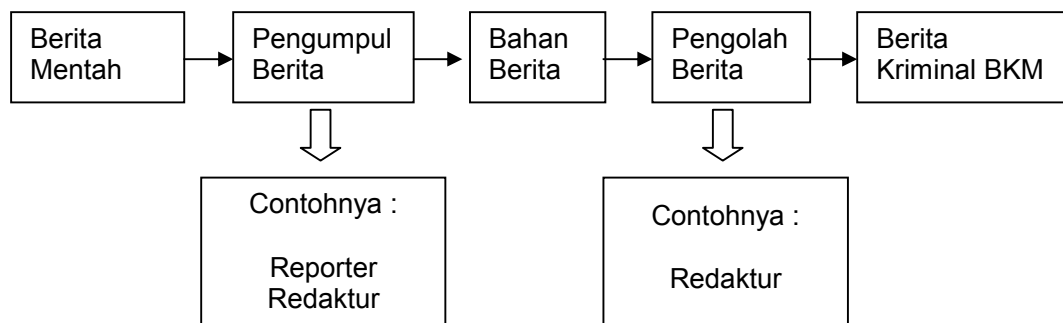
Teori pertama yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori *Gatekeeper*. Pesan-pesan (M1, M2, M3) diterima oleh *gatekeeper* dari berbagai sumber yang berbeda (S1, S2, S3).

Hasil dari observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa seleksi berita kriminal di BKM yang berperan sebagai *gatekeeper* (*palang pintu*) ialah redaktur kriminal dan hukum. Dialah yang paling berwenang dalam menyeleksi sebuah berita.

Dalam hal ini pesan diseleksi oleh *gatekeeper*. Selanjutnya *gatekeeper* secara selektif menyampaikan pesan-pesan tersebut (MA, MB, MC) kepada komunikan yang berbeda (R1, R2, R3). Aspek terpenting yang harus diperhatikan melalui proses ini adalah bahwa pesan-pesan yang diterima *gatekeepers* (M1, M2, M3) tidak sama dengan pesan-pesan yang dikirimkan oleh *gatekeepers* (MA, MB, MC).

Kemudian teori yang kedua ialah proses Teori Arus Berita Internal Dua Tahap. Proses peliputan hingga penyeleksian berita di BKM terlihat dari awal pemilihan isu sampai dengan tahapan penentuan angle berita untuk di terbitkan disetiap harinya. Lebih jelasnya melalui tahap pengumpulan berita dan pengolahan berita seperti yang terdapat pada teori arus berita internal dua tahap bass. Teori ini lahir sebagai penyempurna dari teori *gatekeeper*.

Tahapan seperti yang terdapat pada gambar dibawah ini :



Gambar 4.3 'Double Action Model' dalam pemilihan berita kriminal (Pengumpul berita dan pengolah berita merupakan aspek terpisah dari produksi berita)
(Sumber : MC Quail-Windahl, *Communication Models (For The Study of Mass Communication*, Jakarta: Uni Primas, 1985. hlm. 104)

Langkah pertama terjadi ketika para pencari berita seperti koresponden dan reporter membuat berita mentah menjadi “copy berita atau bahan berita. Disini, para pencari berita baik di luar wilayah Makassar maupun di luar Makassar memilih berita apa saja berdasarkan peristiwa yang sedang terjadi. Kemudian mengkategorikan berita *hard news* apa *soft news* dan menjadi bahan berita yang akan diterbitkan.

Langkah kedua terjadi ketika para pengolah berita merubah atau menggabungkan bahan-bahan itu menjadi hasil akhir atau berita yang sudah jadi (sebuah surat kabar) yang disampaikan kepada publik. Pada tahap ini redaktur menyunting hasil berita dari reporternya kemudian diserahkan kepada redaktur pelaksana.

Setelah sampai ditangan redaktur pelaksana, berita-berita ini kembali disunting untuk disesuaikan dengan foto dan menjadi hasil akhir atau berita yang sudah jadi yang siap diterbitkan. Jadi proses keredaksian sesuai dengan proses *gatekeeping* yang penulis bahas dalam kerangka teori. Hanya saja tindakan *gatekeeping* ini dibagi kedalam dua tahap yaitu tahap pengumpulan berita, pengolahan berita, hingga penyeleksian berita.

Teori agenda setting merupakan proses linear yang terdiri dari tiga tahapan agenda, yaitu (1) Agenda Media, yaitu penentuan prioritas media massa dalam meliput suatu berita kejadian, (2) Agenda Publik, yaitu media agenda dengan cara tertentu akan memengaruhi atau berinteraksi dengan apa yang menjadi pikiran publik maka interaksi akan menghasilkan agenda publik. (3) Agenda kebijakan, yaitu agenda publik akan berinteraksi sedemikian rupa dengan apa yang dinilai penting oleh

penentu kebijakan yakni pemerintah dan interaksi tersebut akan menghasilkan agenda kebijakan.

Sesuai dengan hasil penelitian ditemukan bahwa agenda media dan agenda publik Surat Kabar Harian Berita Kota Makassar tidak berjalan dengan baik. Adanya intervensi dari komisararis dan direksi terhadap kebijakan redaksional Harian Berita Kota Makassar membuat proses pemberitaan terhadap informasi kriminal menjadi tumpul. Pada kasus dugaan ijazah palsu yang dilakukan Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo misalnya. Data dan informasi yang didapatkan reporter di lapangan sudah cukup jelas untuk mendudukan kasus ini pada tataran yang sebenarnya. Tapi saat kasus dugaan ijazah palsu ini diungkap tiba-tiba oleh Pemkab Gowa melakukan intimidasi terhadap koresponden Berita Kota Makassar di Gowa, menghentikan koran langganan yang masuk ke Pemkab Gowa dan memutuskan untuk tidak memasang iklan di Berita Kota Makassar jika pemberitaan kasus ini tidak dihentikan. Bahkan sampai pada proses pra peradilan yang dilakukan warga Gowa terhadap penyidik di Polda Sulsel karena meng-SP3 kan kasus ini, proses pemberitaanya juga tidak lepas dari intervensi oleh Direksi.

Adanya keberpihakan pemilik media kepada sebuah kasus yang akan diberitakan yang membuat independensi media tersebut sebagai media massa di publik dipertanyakan. Pemberitaan dalam media massa patut diragukan sebab tekanan dari pemilik media akan mengakibatkan pemberitaan media menjadi tidak objektif dan mencoreng peran media massa sebagai ruang publik dengan membunuh idealisme seorang jurnalis. Padahal jika mengacu pada konsep Habermas, media massa

merupakan public sphere yang seharusnya dijaga dari berbagai kepentingan.

Berdasarkan teori paradigma kritis disebutkan penguasa atau sehebat pengaruhnya bisa mengubah dunia yang timpang, yang banyak didominasi oleh kekuasaan yang menindas kelompok bawah (Guba & Linclon, 1994:113). Dengan menggunakan kerangka paradigma kritis maka semakin jelas bahwa intervensi pada sebuah media massa adalah sebuah pelanggaran berat. Hal ini juga diperkuat dengan UU Pers No 40 tahun 1999 tentang kebebasan pers.

Hal sama juga terjadi pada kasus penganiayaan yang dilakukan Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru kepada enam orang warganya yang juga merupakan pendukung salah satu kandidat Gubernur Sulsel. Awalnya, pemberitaan kasus ini berjalan dengan baik. Tapi saat penyidik Polres Wajo menemukan fakta keterlibatan Bupati, secara mengejutkan koresponden Berita Kota Makassar di Kabupaten Wajo meminta kepada Direktur dan Pemred untuk menghentikan pemberitaan terhadap kasus ini atas permintaan Pemkab dengan alasan jika tetap diberitakan bisa mengganggu stabilitas keamanan Pilgub di Kabupaten Wajo. Kasus ini sedang dalam proses pelimpahan berkas dari penyidik Direktorat Kriminal Umum (Diskrimum) Polda Sulsel ke tim Jaksa Kejaksaan Tinggi Sulsel.

Begitu derasnya respon publik atas kasus ini, proses penanganannya kemudian diambil alih oleh Polda Sulsel. Di Polda Sulsel, Bupati Wajo kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Selama proses pemeriksaan, yang biasanya wartawan diperbolehkan meliput dan

mengambil gambar tiba-tiba dilarang dengan tanpa alasan yang jelas dari penyidik.

Informasi yang diperoleh dari penyidik dan Kabid Humas Polda Sulsel setelah pemeriksaan juga tidak menyentuh substansi persoalan yang sebenarnya terjadi. Hingga kemudian, kasus penganiayaan ini sempat diungkap di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Ketua MK Mahfud MD meminta agar Bupati dihadirkan tapi hingga persidangan selesai sang Bupati juga gagal didatangkan ke sidang MK.

Untuk kasus pembunuhan akuntan Bank Indonesia dan perampokan Bank Mandiri Cabang Sengkang juga terjadi intervensi. Hanya saja intervensi yang dilakukan melalui direksi berhasil dimentahkan di meja redaksi dengan pertimbangan bahwa kasus yang telah menelan korban jiwa sangat tidak manusiawi untuk dipetieskan. Redaksi tetap memberikan peristiwa ini hingga kasusnya bergulir di pengadilan.

Sedangkan kasus pencurian Fasilitas Umum (Fasum) Lapangan Karebosi, intervensi terhadap kasus ini cukup tinggi. Faktanya, intervensi tak hanya dilakukan oleh direksi terhadap kebijakan redaksional BKM tapi juga dilakukan oleh komisar. Mereka rela turun gunung hanya sekedar mengawal peristiwa ini agar tidak lolos ke meja redaksi. (Muhammad Arsan Fitri, 2013).

Padahal sesuai dengan kebijakan redaksional dan mengacu pada undang-undang pokok pers bahwa setiap informasi yang masuk dan didukung oleh data dan fakta, sumber informasi yang jelas dan dapat

dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang , sudah melalui proses gatekeeping dan gatekeeper maka berita tersebut layak diberitakan. Hal itu sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Pokok Pers No 40 tahun 2009.

Antara agenda media dan agenda publik memiliki korelasi tentang kebijakan redaksional terhadap informasi kriminal Surat Kabar Harian Berita Kota Makassar. Hanya saja peneliti menemukan bahwa secara substantif kedua agenda ini fokus dalam pencarian sebuah informasi untuk dijadikan sebagai sebuah berita sementara hal yang menjadi pembeda hanya pada aspek realitas di lapangan. Agenda Media : *Visibility* (visibilitas), jumlah dan tingkat menonjolnya berita *Audience Salience* (tingkat menonjol bagi khalayak), relevansi isi berita dengan kebutuhan khalayak *Valence*(valensi), menyenangkan atau tidak menyenangkan cara pemberitaan bagi suatu peristiwa sedangkan agenda Publik adalah opini atau sikap masyarakat terhadap suatu isu *Familiarity* (keakraban), derajat kesadaran khalayak akan topik tertentu; *Personal salience* (penonjolan pribadi), relevansi kepentingan individu dengan ciri pribadi; *Favorability* (kesenangan), pertimbangan senang atau tidak senang akan topik sebuah berita.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bab V merupakan bagian terakhir atau bagian penutup dari penulisan. Dalam bab ini akan diuraikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian sekaligus pula akan diungkapkan saran –saran yang dapat dijadikan rujukan bersama dalam memahami persoalan dalam penelitian

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Agenda media tentang kebijakan redaksional dalam menyiarkan berita kriminal di Surat Kabar Harian Berita Kota Makassar secara substantif hanya berjalan pada tataran konsep tapi dalam praktiknya di lapangan tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan di meja redaksi. Penyebabnya adalah karena adanya intervensi dari sejumlah pihak seperti komisaris, direksi, redaktur dan objek pemberitaan. Kondisi ini membuat para reporter dilematis dalam mengambil keputusan terutama saat menerima penugasan dari koordinator liputan dan koordinator daerah.
2. Meskipun agenda publik Surat Kabar Harian Berita Kota Makassar sudah berjalan namun dalam realitasnya tidak sesuai perencanaan

awal. Dalam sehari berita kriminal yang diproduksi hanya sekitar 70 persen dari berita yang diterbitkan. Sisanya ada yang dibatalkan dan ada yang ditarik ke halaman dalam dengan *space* yang sangat kecil dan penjudulan yang terkesan dipaksakan. Hal ini terjadi karena adanya intervensi dari direksi dan juga pihak-pihak tertentu yang sangat berkepentingan dengan berita yang akan diterbitkan.

3. Kesesuaian antara agenda media dan agenda publik tentang kebijakan redaksional Harian Harian Berita Kota Makassar dalam penyiaran Berita Kriminal di Kota Makassar tidak berjalan secara efektif. Karena dalam tataran realitas, konsep yang telah dibangun tidak sejalan sesuai dengan yang direncanakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka dapat disarankan kepada redaksi Surat Kabar Harian Berita Kota Makassar sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efektivitas kerja redaksi terutama pada agenda media, maka perlu dilakukan langkah kongkrit yang sifatnya preventif agar intervensi dari pihak di luar redaksional tidak lagi memengaruhi agenda media Harian Berita Kota Makassar.
2. Pada agenda publik diperlukan upaya persuasif bagi pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi, korlip dan korda dalam menghadapi intervensi dari pihak luar. Hal ini perlu dilakukan agar agenda

Makassar. publik bisa terlaksana sesuai dengan program kerja harian di redaksi.

3. Untuk kesesuaian agenda media dan agenda publik Harian Berita Kota Makassar Pemimpin Redaksi perlu meningkatkan efektivitas kinerja redaksi, penataan dan penguatan secara sistematis agar semua program terutama agenda media, agenda publik dan program pemberitaan informasi kriminal bisa berjalan sesuai perencanaan awal. Ini sangat diperlukan demi menjaga kewibawaan redaksi dari berbagai intervensi karena adanya berbagai kepentingan yang bisa dengan mudah memveto hasil perencanaan setiap harinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyadi, 1998. Fungsi Kontrol dan Kritik Pers Daerah terhadap Pemerintahan Daerah (Analisis Isi Surat Kabar, Kedaulatan Rakyat dan Bermasyarakat). Skripsi. Universitas Indonesia. Depok.
- Descartes 2004. Fungsi Agenda Setting Koran Tempo dan Metro TV Mengenai Isu Politik (Kasus Anggota Sekretariat Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Jakarta Selatan). Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Domminick, Joseph R. dan Rogers D. Wimmer 2000. Mass media Research An Introduction. Wadsworth Publishing Company.
- Hammad, Ibnu 1997. Media Massa sebagai Wahana Benturan Peradaban (Sebuah Studi Semiotika Sosial). Thesis. Universitas Indonesia. Depok.
- Kusuma, Wijaya 1991. Hubungan antara Agenda Surat Kabar dengan Agenda Anggota DPRD tentang Prioritas Isu Nasional dan Daerah (Studi Agenda-Setting Surat Kabar Kompas Dan Akcaya dengan Anggota DPRD Tingkat I Propinsi Kalimantan Barat). Thesis. Universitas Indonesia. Depok.
- Machfudi 1996. Fungsi Kontrol Sosial Media Massa: Analisis Isi Terhadap Rublik Kompasiana dalam Surat Kabar Harian Kompas Tahun 1966-1967. Skripsi. Universitas Indonesia. Depok.
- McComb, Maxwell 2006. 'New Frontiers in Agenda Setting: Agendas of Attributes and Frames'. http://journalism.utexas.edu/sp/groups/public/@commjour/documents/biography/prod75_008205.pdf. diakses pada 27 februari 2009.
- McComb, Maxwell. The Agenda-Setting Role of the Mass Media in the Shaping of Public Opinion. <http://sticerd.lse.ac.uk/dps/extra/McCombs.pdf>. diakses pada 27 februari 2009.
- McQuail, Denis 1987. Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Edisi kedua Erlangga. Jakarta.
- McQuail, Denis dan Sven Wimdahl 1995. Communication Models for the Study of Mass Communication. Longman. London dan New York.
- Muis, Abdul 1999. Jurnalistik Hukum Komunikasi Massa. PT Dharu Anuttama.

- Nasution, Zulkarimein 1990. Komunikasi Politik suatu Pengantar. Ghalin Indonesia. Jakarta.
- Nimmo, Dan 2000. Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, Media. Penerbit. PT Rosdakarya. Bandung.
- Nimmo, Dan 2001. Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek. Penerbit. PT Rosdakarya. Bandung.
- Purnaningsih, Ninuk 2006. Dasar-Dasar Komunikasi. Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Rakhmat, Jalaluddin 2002. Metode Penelitian Komunikasi. Penerbit PT Rosdakarya. Bandung.
- Riswadi, 2000. Isu-Isu Demokratisasi pada Surat Kabar Indonesia Era Orde Baru dan Orde Reformasi (Suatu Analisis Komunikasi Politik dalam Harian Kompas, Merdeka, Dan Republika). Skripsi. Universitas Indonesia. Depok.
- Rivers, William L. dan Cleve Mathews 1994. Etika Media Massa dan Kecendrungan Untuk Melanggarnya. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Siahaan, Parlagutan 1997. Hubungan Agenda Media Surat Kabar Kompas dan Surat Kabar Pembaruan dengan Agenda Publik Mahasiswa GMKI. Thesis. Universitas Indonesia. Depok.
- Yuniati, Yenni 2002. 'Pengaruh Berita di Surat Kabar terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Politik' Mediator, Vol. 3 No. 1, hal 71-95.